

**PROGRAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (PMP)
BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI
SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMPN 1 SAMBIT
PONOROGO)**

SKRIPSI



OLEH :

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM: 210313028

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Khotimah, Khusnul. 2017. Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah (Studi Kasus di SMPN 1 Sambit Ponorogo). **Skripsi.** Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. A.B. Musyafa' Fathoni, M. Pd. I.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen (SIM), Mutu Pendidikan

Dalam kebijakan pembaruan pendidikan, Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperbaiki pendidikan supaya bisa menghasilkan output yang berkualitas. Melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM), yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) akan lebih memudahkan sekolah dalam menganalisis standar mutu pendidikan sekolah agar sesuai dengan dengan standar mutu pendidikan Nasional.

Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana respon sekolah terhadap implementasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit yang diinstruksikan oleh Pemerintah ? (2) Bagaimana implementasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam meningkatkan mutu pendidikan Nasional di SMPN 1 Sambit ? (3) Apa kontribusi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap Sistem Penjaminan Mutu di SMPN 1 Sambit ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, jenis penelitian studi kasus di SMPN 1 Sambit Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; (1) Respon sekolah terhadap program PMP berbasis SIM ini sudah cukup baik, ada yang menerima dengan senang hati atas program PMP, ada juga yang masih membutuhkan proses dalam penerimaan program tersebut. (2) Implementasi program PMP berbasis SIM di SMPN 1 Sambit dimulai dengan sosialisasi kemudian pengisian dan pemasukan data kedalam aplikasi dan langkah yang terakhir dari sekolah mengadakan evaluasi program sekolah yang masih belum sesuai dengan standar mutu pendidikan. (3) Kontribusi program PMP berbasis SIM di SMPN 1 Sambit adalah sebagai acuan sekolah agar mengetahui kekurangan – kekurangan dari program sekolah secara cepat, jelas, dan valid supaya sekolah dapat mengevaluasi serta memperbaiki mutu sekolah sesuai dengan standar mutu pendidikan Nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai sekarang, masalah pendidikan diakui sangat strategis dan sangat penting. Namun, segala kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan belum mencapai hal yang maksimal. Malahan dalam kebijakan yang dilaksanakan sering terjadi pernik – pernik masalah yang menyangkut pemerataan, relevansi, kualitas produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Semuanya berkumpul di antaranya masalah administrasi pendidikan.¹

Pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri.² Sebagaimana yang terjadi pada dunia produksi pada umumnya, kepedulian akan mutu produk pendidikan pun didorong oleh persoalan dasar; bagaimana mengintegrasikan semua fungsi dan proses dalam suatu organisasi agar tercapai peningkatan mutu secara berkelanjutan.³

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini turut mempercepat laju perkembangan ekonomi dan industri, yang mempunyai implikasi penting

¹Idhoci Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2013),2.

²H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 80.

³Idhoci Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2013),19.

terhadap dunia pendidikan. Salah satu dampak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang paling nyata dirasakan yaitu menyangkut lapangan kerja, baik dilihat dari kebutuhan masyarakat maupun kemampuan dalam menyediakan atau menyiapkan tenaga kerja. Dalam hubungannya dengan masalah penyiapan tenaga kerja, yang dihadapi di lapangan yaitu rendahnya mutu tenaga kerja di Negara kita. Banyak variabel yang turut mempengaruhi mutu tenaga kerja, biasanya variabel kondisi fisik, kualitas pendidikan, dan etos kerja sangat dominan dalam menentukan produktivitas tenaga kerja.⁴

Pendidikan diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembentukan SDM (human capital) dalam aspek kognitif, afektif, ataupun keterampilan, baik dalam aspek fisik, mental maupun spiritual. Hal ini jelas menuntut kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik agar kualitas hasil pendidikan dapat benar – benar berperan optimal dalam kehidupan masyarakat.⁵

Di dalam PP No. 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu; (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan,

⁴Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 14.

⁵Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 243.

(4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, (8) standar penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/ 2005 Pasal 4).⁶

Kualitas pendidikan merupakan hal yang penting dalam memetakan kondisi pendidikan secara utuh, meskipun dalam tataran praktis, titik tekan dalam melihat kualitas bisa berbeda – beda sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kajian atau tinjauan. Kualitas pendidikan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan; jika suatu proses pendidikan berjalan baik, efektif dan efisien, maka terbuka peluang yang sangat besar memperoleh hasil pendidikan yang berkualitas.⁷

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sistem pendidikan Indonesia diarahkan pada tercapainya cita – cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Sebagaimana terungkap dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan, “Pendidikan nasional

⁶UharSuharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: PT. RefikaAditama, 2010), 233.

⁷Ibid, 231.

bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.⁸

Namun demikian dalam kenyataannya, perhatian dunia pendidikan akan kualitas merupakan hal yang baru jika dibandingkan dengan dunia bisnis. Oleh karena itu, kualitas dan penjaminan kualitas dapat dipandang sebagai suatu inovasi dalam pendidikan. Perkembangan dan implementasi manajemen mutu dan penjaminan mutu tidak terlepas dari perkembangan gerakan mutu yang terjadi dalam dunia bisnis. Gerakan kualitas merupakan gerakan yang menunjukkan pada tahapan – tahapan yang bersifat akumulasi dan bersifat memperbaiki dari gerakan – gerakan sebelumnya. Dalam hubungan ini sosialisasi menjadi hal yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi penjaminan kualitas/ manajemen kualitas pendidikan.

Salah satu agenda reformasi pendidikan adalah perbaikan mutu pendidikan yang dimulai dari tingkat prasekolah SD, SLTP, SMU, sampai perguruan tinggi dan kegiatan non – formal di dalam kehidupan masyarakat. Masing – masing tingkatan memiliki karakteristik dan aturan tersendiri dalam pelaksanaannya.

⁸Kemdikbud. Badan Standar Nasional Pendidikan, <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/berita/aplikasi-penjaminan-mutu-pendidikan-pmp>, pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 11.15.

Pada era sebelumnya, masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan adalah persoalan yang hanya diselesaikan oleh pemerintah dan para pengelola pendidikan. Namun, memasuki abad ke – 21 ini, khususnya di Indonesia, pemahaman pentingnya pendidikan telah mengalami kemajuan yang berarti di mana masyarakat telah berinisiatif sendiri dalam mengelola pendidikan dan penyelenggaraanya, yakni dengan menggunakan pola manajemenberbasiskan masyarakat (education based community), padahal pengelolaan pendidikan sebelumnya dilakukan secara rutinitas tanpa ada pola manajemen sehingga pendidikan bergantung pada penguasa (birokrasi) dan sentralistik. Manajemen dalam pendidikan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan global yang disertai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Perubahan itu sendiri sangat cepat dan pesat, sehingga perlu ada perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement) di bidang pendidikan sehingga output pendidikan dapat bersaing dalam era globalisasi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi.⁹

Pendidikan pada dasarnya adalah proses komunikasi yang di dalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai – nilai, dan keterampilan – keterampilan, di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat, dari generasi ke generasi. Manajemen sistem informasi pendidikan adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi –

⁹DeniDarmawan, Sistem Informasi Manajemen (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 40.

fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan. Maksud dilaksanakannya manajemen sistem informasi pendidikan adalah sebagai pendukung kegiatan fungsi manajemen seperti planning, organizing, staffing, directing, evaluating, coordinating, dan budgeting dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan tujuan fungsi – fungsi operasional dalam organisasi pendidikan.¹⁰

Dalam menghadapi globalisasi, dunia pendidikan Indonesia harus secepatnya berbenah diri dalam meningkatkan sistem informasi guna menunjang daya saing sumber daya manusia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Sistem informasi yang akan diciptakan harus seimbang antara infrastruktur teknologi yang tersedia dengan kemampuan sumber daya manusianya sehingga tidak terjadi ketimpangan yang sangat jauh, dan sistem informasi tidak dapat terwujud secara signifikan dalam menunjang kuantitas maupun kualitas pendidikan secara mendasar. Di samping itu, sistem informasi semakin dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kelancaran aliran informasi dalam lembaga pendidikan, kontrol kualitas, dan menciptakan aliansi atau kerja sama dengan pihak lain yang dapat meningkatkan nilai lembaga pendidikan tersebut.¹¹

Manajemen pendidikan untuk saat ini merupakan hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan output

¹⁰Ibid, 26.

¹¹EtiRochaety, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara),

yang berkualitas tinggi. Kenyataan yang ada, sekarang ini banyak institusi pendidikan yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan pendidikannya. Selanjutnya problem sumber daya manusia (SDM) itu sendiri. Artinya, meskipun usaha untuk meningkatkan mutu tenaga pendidikan terus dilakukan, secara umum kualifikasi pendidikan para guru/ dosen di Indonesia masih belum memadai. Di samping Suasana akademik belum memuaskan dan mutu staf administrasi pendidikan masih jauh dari memadai untuk mendukung tuntutan tugas administrasi pendidikan di setiap lembaga pendidikan yang ada.¹²

Dengan melihat fenomena diatas, tampak bahwa penjaminan kualitas merupakan suatu kewajiban bagi lembaga pendidikan dalam melakukan penjaminan kualitas pendidikan, agar sesuai dengan standar mutu pendidikan yang diharapkan agar terwujudnya institusi yang bermutu dalam aspek akademik (kualitas pembelajaran, kualitas penelitian, kualitas pengabdian masyarakat, dan non akademik (sarana, fasilitas, dan administrasi) dalam menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan potensi individu secara utuh (kecerdasan intelektual, emosional, dan motorik), sehingga memiliki kecerdasan, karakter, dan daya saing di era global.¹³ Maka dari itu suatu lembaga terutama lembaga pendidikan sangat membutuhkan suatu sistem ataupun program yang mampu menjembatani informasi yang seharusnya diberikan oleh pemimpin program

¹²Ibid, 42.

¹³Nanang Fatah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 10.

sehingga dapat dijadikan acuan serta bahan pertimbangan untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan.

Secara kelembagaan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan fungsi manajemen pendidikan. SPMP sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan atau regulasi. SPMP dapat dipandang sebagai instrument kebijakan dalam mengefektifkan implementasi kebijakan untuk mencapai akuntabilitas satuan pendidikan terhadap masyarakat atau publik. Di Indonesia, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non – formal pada setiap jenjang dan jenis melalui pendekatan audit, pengukuran dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT, BAN SM, dan BAN PNFI.¹⁴

Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME).SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan standard nasional pendidikan, dan badan akreditasi

¹⁴Nanang Fatah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 3.

sekolah/ madrasah. Dalam rangka memfasilitasi agar proses pelaksanaan sistem penjaminan mutu untuk satuan pendidikan berjalan lebih efektif dan efisien, direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah telah mengembangkan aplikasi penjaminan mutu pendidikan (PMP). Adanya aplikasi PMP diharapkan dapat memberikan fasilitasi satuan pendidikan dalam penerapan sistem penjaminan mutu dalam rangka memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Aplikasi PMP dirancang sedemikian rupa sesuai kaidah – kaidah sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan standard pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) bertugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional sehingga tercapainya pemenuhan standar mutu pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan.

Sama halnya dengan yang ada di SMPN 1 Sambit Ponorogo juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan sekolah unggul dan tidak kalah saing dengan sekolah yang lain. SMPN 1 Sambit mempunyai guru – guru dan staf – staf yang sudah berpengalaman dalam mengelola sekolah supaya berkembang seiring dengan tantangan zaman yang semakin maju. Guru – guru

dan seluruh jajarannya merupakan tenaga lama yang sudah sejak lama berada di kursi SMPN 1 Sambit meskipun demikian, semangat pengabdian mereka kepada sekolah sangat tinggi sehingga SMPN 1 Sambit dapat unggul dalam berbagai bidang diantaranya program Adiwiyata yang berhasil mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati Ponorogo sebagai sekolah Adiwiyata Se – Ponorogo. Selain program Adiwiyata ada juga program greenhouse dan tanaman obat sekolah dalam rangka melatih siswa untuk menjaga serta memelihara lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat nantinya. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan kualitas/ mutu sekolah supaya baik dan dapat mengembangkan program – program sekolah agar sesuai dengan standard mutu pendidikan.¹⁵

Berdasar pada apa yang ada dan terdapat di SMPN 1 Sambit Ponorogo maka peneliti ingin menelitinya lebih lanjut dengan mengajukan judul :**“Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah (Studi Kasus di SMPN 1 Sambit Ponorogo)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti perlu menentukan fokus masalah. Penelitian ini hanya akan membahas tentang pelaksanaan Program Penjaminan Mutu (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit, Ponorogo.

¹⁵ Lihat transkrip observasi nomor: 03/O/15-05/2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon sekolah terhadap implementasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit yang diinstruksikan oleh Pemerintah?
2. Bagaimana implementasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam meningkatkan mutu pendidikan Nasional di SMPN 1 Sambit ?
3. Apa kontribusi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap Sistem Penjaminan Mutu di SMPN 1 Sambit ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui respon sekolah terhadap implementasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit yang diinstruksikan oleh Pemerintah
2. Untuk mengetahui implementasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam meningkatkan mutu pendidikan Nasional di SMPN 1 Sambit

3. Untuk mengetahui kontribusi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap Sistem Penjaminan Mutu di SMPN 1 Sambit.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian ini, ialah ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat berikut ini:

1. Manfaat Secara Teoritik

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu komponen terpenting dalam meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dimulai dari proses perbaikan, yaitu dengan mengevaluasi program – program sekolah serta penerapannya supaya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai calon pendidik, yang tentunya mengemban tugas dan tanggung jawab yang tinggi dalam pengajaran, dapat dijadikan evaluasi sekolah, khususnya dalam menerapkan mutu pendidikan yang sesuai dengan standar mutu pendidikan.

b. Bagi Guru/ Pendidik

Sebagai pendidik, yang tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu sekolah yang baik dan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional serta sesuai dengan tujuan sekolah.

c. Bagi Siswa

Sebagai siswa, dalam proses pembelajaran siswa diharapkan mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan standar mutu pendidikan, agar menjadi output yang berhasil dan siap menghadapi tantangan baru dalam pendidikan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian kualitatif ini terdiri dari lima bab yang berisi :

Bab 1 berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memaparkan data.

Bab II adalah kajian pustaka, yang berisi tentang deskriptif landasan teori dan telaah pustaka. Untuk memperkuat judul penelitian, sehingga antara data dan teori saling melengkapi dan menguatkan. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu tentang pengertian program penjaminan mutu pendidikan (PMP) berbasis sistem informasi manajemen (SIM), implementasi program penjaminan mutu pendidikan (PMP) berbasis

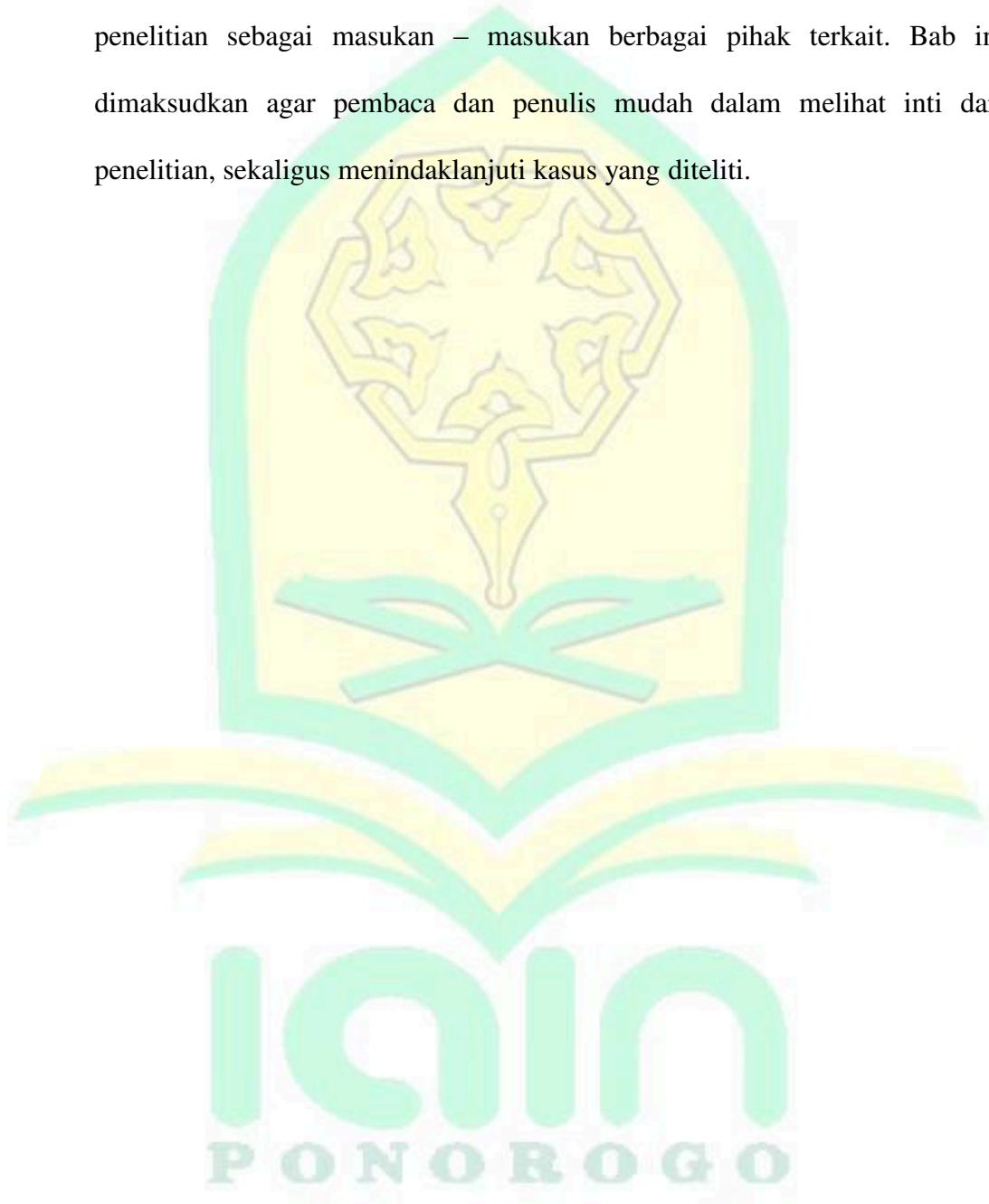
sistem informasi manajemen (SIM), kontribusi yang diberikan program penjaminan mutu pendidikan (PMP) berbasis sistem informasi manajemen (SIM).

Bab III adalah metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian program penjaminan mutu pendidikan (PMP) berbasis sistem informasi manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit Ponorogo. Lokasi yang digunakan dalam penelitian, data dan sumber data yang digunakan untuk meneliti program penjaminan mutu pendidikan (PMP) berbasis sistem informasi manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit Ponorogo.

Bab IV adalah temuan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data khusus tentang implementasi program penjaminan mutu pendidikan (PMP) berbasis sistem informasi manajemen (SIM), kontribusi yang diberikan program penjaminan mutu pendidikan (PMP) berbasis sistem informasi manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit Ponorogo.

Bab V adalah bab ini berisi tentang analisis penelitian. Analisis penelitian adalah sebuah upaya menafsirkan data penelitian dengan menggunakan acuan kerangka teori yang sudah dipaparkan pada bab II.

Bab VI adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan saran – saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan – masukan berbagai pihak terkait. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti dari penelitian, sekaligus menindaklanjuti kasus yang diteliti.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PENELITIAN TERDAHULU

A. Kebijakan Pembaruan Pendidikan

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program – program pemerintah. Setiap kebijakan Negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan keberadaan Negara tersebut. Negara dengan segala fungsinya berhak untuk membuat atau tidak membuat kebijakan. Kebijakan publik akan meliputi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sebagai balikan untuk kembali merumuskan kebijakan yang sesuai.

Secara terminologi, kebijakan dapat saja disebut sebagai serangkaian tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan komponen – komponen masukan yang perlu dimanfaatkan dalam usaha memperoleh setiap produk atau keluaran. Proses untuk mencapai produk atau keluaran tersebut senantiasa dilakukan melalui apa yang disebut kebijakan. Berdasarkan unsur – unsur tersebut, maka setiap kebijakan akan selalu mengandung sesuatu yang oleh orang banyak diberikan makna yang

prinsipil, dan tidak merugikan orang banyak, karena setiap kebijakan selalu didasarkan atas peraturan perundang – undangan.

Dalam konteks tata Negara dikemukakan bahwa:

- a. Kebijakan Negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
 - b. Kebijakan itu berisi tindakan – tindakan atau pola – pola tindakan pejabat – pejabat pemerintah.
 - c. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar – benar dilakukan oleh pemerintah.
 - d. Kebijakan Negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
 - e. Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang – undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).¹⁶
2. Kebijakan Pembaruan Pendidikan

Pembaruan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan hidup dan penghidupan. Apa yang berbeda dalam

¹⁶ Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 33-35.

setiap langkah dan prospek pembaruan yang akan datang, akan semakin cepat dan memengaruhi setiap bagian dari kehidupan, termasuk nilai – nilai kepribadian, kesusilaan, kedaerahan, baik secara individu maupun kelompok.

Pandangan ini menunjukkan bahwa dorongan untuk melakukan pembaruan mempunyai kekuatan dan sumber – sumber pendorong tertentu. Kekuatan – kekuatan tersebut dapat berupa budaya kerja, teknologi, kecenderungan sosial, globalisasi, dan mungkin dalam tatanan politik dunia. Sumber kekuatan budaya kerja, kemungkinan dari perbedaan cultural, peningkatan professional, dan banyaknya hal baru yang memerlukan keterampilan baru pula. Sumber kekuatan teknologi, dapat bersumber dari otomatisasi sistem, komputerisasi, atau merekayasa kembali. Sumber kecenderungan sosial, mungkin dari pertumbuhan dan peningkatan pendidikan tinggi, penagguhan usia perkawinan. Sumber kekuatan globalisasi, mungkin dari pengaruh pasang – surut dunia, persaingan global, merger, akuisisi, dan konsolidasi.¹⁷

Usaha pembaruan sering menimbulkan berbagai bentuk perlawanan. Pro dan kontra terhadap upaya – upaya pembaruan memang senantiasa ada. Para pembaru yang berpengalaman biasanya menyadarinya. Beberapa

¹⁷ Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 15.

pembaru tidak memulai pembaruan yang diperlukan sebab mereka merasakan tidak mampu untuk melakukannya dengan berhasil. Kebanyakan pembaru tidak mempergunakan kesempatan waktu untuk berpikir apa yang menjadi penyebab orang melawan setiap pembaruan.

Secara teoritis, perlawanan terhadap pembaruan dapat dibagi kedalam perlawanan individu dan perlawanan organisasi. Seseorang melawan pembaruan karena tiga alasan utama yaitu: kepentingan diri, kesalahpahaman atau ketidakpercayaan, dan penilaian yang berbeda. Kebanyakan organisasi berkeyakinan telah melakukan hal yang terbaik dan konsisten.

Sumber – sumber perlawanan organisasional sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya muncul oleh aspek – aspek yang berhubungan dengan struktur organisasi, adanya pembatasan dalam perubahan, afiliasi kekelompokan, perbedaan masing – masing keahlian, ketidakstabilan dalam berhubungan dan ketidakstabilan dalam penyediaan sumber – sumber.

Kebanyakan para pembaru beranggapan bahwa pesan – pesan pembaruan yang disampaikan kepada para anggotanya telah mengalami proses pemikiran dan dipersiapkan dengan matang, dirumuskan dengan sejelas – jelasnya, tetapi setelah disampaikan kepada para anggotanya,

jangan dituruti dimengertipun tidak, bahkan melakukan perlawanan. Dalam teori komunikasi organisasi, sering disebut dengan rintangan yang mengganggu dan menghambat proses pembaruan, seperti halnya konflik asumsi, perbedaan pemahaman, ketidakstabilan emosi, keterampilan teknis berkomunikasi dan struktur serta spesifikasi pekerjaan dalam organisasi.

Konflik asumsi, berkenaan dengan latar belakang yang mendasari perlunya dilakukan pembaruan. Para pembaru berasumsi bahwa pesan – pesan pembaruan sudah disampaikan dengan cukup jelas, dengan sudah menganggap bahwa para anggotanya akan menurutinya. Kenyataannya setelah pesan pembaruan itu disampaikan malahan melakukan perlawanan, karena asumsi – asumsi para anggotanya berbeda dengan asumsi para pembarunya. Perbedaan latar belakang kehidupan memungkinkan terbentuknya persepsi yang berbeda, sehingga komunikasi antara pembaru dengan anggota sudah tidak efektif lagi.

Perbedaan pemahaman bahasa (semantik), berkenaan dengan penggunaan bahasa dalam rumusan atau butir – butir kebijakan pembaruan. Sering kali rumusan pesan dalam butir – butir kebijakan pembaruan menggunakan bahasa dan istilah yang sulit dipahami oleh individu yang terkena pembaruan.

Ketidakstabilan emosi, berkenaan dengan reaksi subjektif setiap individu yang keluar dari unsur – unsur perasaan manusia. Dalam teori komunikasi, emosi ini akan memengaruhi proses encoding dan decoding, sehingga pesan – pesan kebijakan pembaruan senantiasa dilatarbelakangi oleh perasaan dan opini masing – masing pihak.

Perbedaan pemahaman terhadap tujuan pembaruan sering terjadi pada jajaran pembaru tingkat menengah, terutama dalam menerjemahkan visi dan misi dilakukannya pembaruan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa posisi dan tugas manajemen puncak berkenaan dengan tugas – tugas strategik, dan manajemen tingkat menengah berkenaan dengan tugas – tugas koordinatif, serta manajemen tingkat bawah berada pada tugas – tugas yang bersifat operasional. Jadi, tugas manajemen tingkat menengah dan tingkat bawah itu bagaimana tujuan – tujuan umum dari pembaruan tersebut dapat diterjemahkan dan dikembangkan kedalam tujuan – tujuan yang lebih spesifik, serta disebarluaskan kepada pihak – pihak yang terkena pembaruan, sehingga mempunyai kesamaan persepsi, pandangan, dalam memahami maksud dan tujuan dilakukannya pembaruan yang dimaksud.

Perlawanan seperti ini sering terjadi, ketika kebijakan pembaruan dilaksanakan. Misalkan pada pembaruan kurikulum, standarsasi pendidikan formal, evaluasi kinerja pegawai, dan lainnya. Kebanyakan

para pembuat kebijakan sering beranggapan bahwa pihak – pihak yang terkena kebijakan, seperti para pegawai atau tenaga kependidikan yang terkena kebijakan akan mudah memahami arti pentingnya kebijakan itu dilakukan, dan tidak akan menimbulkan penolakan – penolakan. Di pihak tenaga kependidikan yang terkena kebijakan beranggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan “mengada – ada” atau kebijakan “proyek” yang hanya menguntungkan para birokrat pendidikan. Kebijakan yang diharapkan para tenaga kependidikan di tingkat bawah hanya menginginkan kebijakan yang dapat mengangkat harkat dan martabat diri dan pekerjaannya, bukan dengan menambah beban pekerjaan.¹⁸

3. Implementasi Kebijakan Pembaruan Pendidikan

Selanjutnya, dalam memahami suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi. Implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah – langkah yang strategik, maupun

¹⁸ Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 21-26.

operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Tingkat keberhasilan proses ini akan dipengaruhi berbagai unsur, baik yang bersifat mendukung atau menghambat, serta lingkungan, baik fisik, sosial maupun budaya. Hal yang perlu diwaspadai adalah dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah, sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan kebijakan.

Suatu kebijakan akan menemui banyak masalah pada tahap pengimplementasiannya, karena itu alternatif yang dipilih oleh pembuat kebijakan, harus dapat diimplementasikan. Masalah tersebut sering diartikan secara sederhana, padahal masalah oleh seseorang mungkin menguntungkan bagi orang lain. Sehubungan dengan sifat praktis dan terkandungnya tujuan dalam perumusan kebijakan, maka implementasi kebijakan berkenaan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi para pelaku. Namun, ketika kegagalan kebijakan terjadi, maka perlu dikaji apakah karena perumusan kebijakan tersebut memang buruk atau kesalahan dalam mengimplementasikannya.

Implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam menentukan proses perumusan kebijakan selanjutnya. Sebab, berhasil

tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya.¹⁹

4. Responsivitas Hasil Kebijakan

Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok – kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya: efektivitas, efisiensi, kecukupan pemerataan dianggap masih gagal jika belum menanggapi (responsif) terhadap kebutuhan aktual dari suatu kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.²⁰

Respon tersebut terdapat dua respon yaitu ada respon positif dan respon negatif. Respon apapun mestinya menjadi evaluasi dan masukan yang mesti dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil pelaksanaan program yang maksimal sesuai dengan tujuan kebijakan pendidikan pemerintah daerah yang berupaya memajukan pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah dan masyarakat. Setelah keputusan kebijakan disahkan ada dua dampak yang akan terjadi pada masyarakat atas kebijakan tersebut yaitu menerima dan menolak. Faktor

¹⁹ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 41-42.

²⁰ Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 235.

yang mempengaruhi masyarakat untuk menerima/ melaksanakan kebijakan pemerintah karena :

- a. Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah
- b. Adanya kepentingan pribadi dan
- c. Adanya hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan²¹

Sedangkan faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mematuhi atau melaksanakan kebijakan pemerintah, antara lain karena :

- a. Bertentangan dengan sistem nilai masyarakat dan
- b. Ketidakpastian hukum²²

Faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan – hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Persepsi sangat penting dalam proses kebijakan karena mengondisikan definisi dari permasalahan. Seperti yang digunakan di sini, persepsi memang berarti penerimaan dan pernyataan dari suatu kejadian

²¹ Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 22-23.

²² Ibid, 23.

melalui penglihatan, pendengaran, rabaan, dan membaui yang terlibat sehingga pemahaman itu menjadi suatu interpretasi. Kejadian dipandang dalam suatu cara tertentu. Dengan demikian, persepsi ini mengacu pada suatu kejadian, definisi mengacu pada suatu masalah.

Orang mendefinisikan masalah untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Tentu saja banyaknya permasalahan yang masuk pemerintah itu diciptakan oleh implementasi kebijakan. Artinya, pemerintah itu sendiri yang menyebabkan kejadian itu dan dipersepsi serta didefinisikan sebagai suatu masalah oleh seseorang atau kelompok. Dengan demikian, pemerintah merupakan pelaku dalam memberikan kontribusi dalam agendanya sendiri.

Agregasi adalah sekumpulan orang yang dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masyarakat. Namun, kumpulan orang yang dipengaruhi ini bukan merupakan suatu organisasi. Dalam hal ini organisasi merupakan perkembangan utama dalam memberikan respons terhadap kejadian dalam masyarakat. Jumlah orang yang dipengaruhi itu, baik anggotanya maupun tingkat dan jenis organisasinya, semuanya akan memengaruhi proses kebijakan dan hasilnya. Di sini, sekali lagi kemungkinan adanya inkongruenitas (ketidaksesuaian) antara persepsi mereka yang dipengaruhi dengan persepsi perwakilannya.²³

²³ Ibid, 22.

Spesifikasi implisit atau eksplisit dari serangkaian tujuan tindakan yang diikuti atau harus diikuti yang terkait dengan pengenalan masalah atau masalah penting dan petunjuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan juga merupakan suatu keadaan atau pendirian yang dikembangkan untuk merespons masalah atau konflik dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Tekanan kebijakan sebagai proses adalah merujuk pada keterlibatan politik dalam mengenali suatu '*masalah*' yang memerlukan respons kebijakan melalui tahapan formulasi dan implementasi, termasuk perubahan – perubahan yang dilakukan selama perjalanannya. Selanjutnya kebijakan itu lebih dari dokumen atau naskah, tetapi kebijakan merupakan proses dan produk.²⁴

Dalam monitoring hasil kebijakan, kita harus membedakan antara dua jenis akibat, yaitu keluaran (output) dan dampak (impact). Keluaran kebijakan adalah barang – barang, jasa, atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran dan kelompok penerima (beneficiaries). Untuk memonitoring keluaran kebijakan dan dampaknya, kita perlu mengetahui kelompok sasaran tidak selalu kelompok penerima. Kelompok sasaran bisa individu, masyarakat, atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan kelompok penerima (beneficiaries). Kelompok penerima adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari

²⁴ Ibid, 135.

kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok yang sekarang menjadi sasaran maupun penerima manfaat belum tentu menjadi kelompok sasaran pada waktu yang akan datang karena generasi mendatang mengalami akibat yang berbeda dari kebijakan dan program yang ada saat ini.²⁵

B. Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP)

a. Pengertian Program

Program dapat diartikan sebagai “rencana”. Program merupakan jabaran dari suatu kebijakan organisasi dalam mencapai visi dan menjalankan misinya. Ia terangkai dari beberapa kegiatan, baik yang diselenggarakan secara berantai ataupun paralel, singkat ataupun lama, yang bermuara pada tujuan program yang telah ditetapkan.²⁶

1. Pengertian Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu (Quality Assurance/ QA) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (review) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan.

²⁵ Ibid, 206.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 3.

Penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagaimana tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, merupakan kegiatan yang sistemik dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Kegiatan yang sistemik dan terpadu tersebut dilakukan oleh satuan/ program pendidikan, penyelenggara satuan/ program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat serta melibatkan dunia usaha

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan terutama beradapada satuan/ program pendidikan. Penyelenggara satuan/ program pendidikan berkewajiban menyediakan dan memberikan bantuan dalam pemenuhan standar. Pemerintahan kabupaten/ kota, pemerintahan provinsi, dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan supervise, pengawasan, evaluasi, fasilitasi, saran, arahan, dan/ atau bimbingan kepada satuan/ program pendidikan.

Di Indonesia, perihal Penjaminan Mutu diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 19/2005, pasal 91²⁷:

- 1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan

²⁷ Nanang Fatah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

- 2) Penjaminan mutu pendidikan dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan
- 3) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Selanjutnya Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan. Apa yang menjadi esensi akreditasi adalah sebagai bentuk Akuntabilitas Publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan dengan menggunakan instrument dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan mencakup:

- 1) Standar Isi
- 2) Standar Proses
- 3) Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Standar Pengelolaan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana
- 7) Standar Pembiayaan Pendidikan
- 8) Standar Penilaian

Perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen Pemerintah Indonesia yang diterapkan melalui berbagai

kebijakan. Pendidikan Nasional merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Oleh karena itu, penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai pihak. Tahapan penjaminan mutu pendidikan dimulai dari penetapan standar mutu, pemenuhan standar, pengukuran dan evaluasi dengan cara pengumpulan data dan analisis, perbaikan dan pengembangan standar dalam peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada acuan mutu pendidikan.²⁸

C. Konsep Sistem Informasi Manajemen (SIM)

1. Sistem Informasi Manajemen

a. Pengertian Sistem

Mengingat lembaga pendidikan di Indonesia merupakan organisasi yang memiliki orientasi ganda (multiple oriented), yaitu organisasi yang berorientasi sosial dan orientasi bisnis. Orientasi sosial pendidikan bertujuan meningkatkan kecerdasan bangsa sedangkan orientasi bisnis pendidikan dalam mempertahankan eksistensi maupun operasionalnya harus memiliki dana yang cukup memadai.

Istilah sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan

²⁸ Nanang Fatah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 5-6.

tertentu. Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur, dokumentasi, formulir dan orang yang bertanggung jawab untuk memperoleh, menggerakkan, manajemen, distribusi data dan informasi. Proses yang harus diikuti dalam pengembangan suatu sistem yang baik disebut system analysis and design.

Secara etimologis, istilah sistem berasal dari Bahasa Yunani, yaitu Systema yang mempunyai arti:

- 1) Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.
- 2) Hubungan yang berlangsung di antara satuan – satuan atau komponen-komponen secara teratur.²⁹

Pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli, menurut Moekijat yaitu:

SIM merupakan sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri dari obyek – obyek, atau unsur – unsur, atau komponen – komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama lain, sedemikian rupa sehingga unsur – unsur tersebut merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.³⁰

Menurut Murdick dalam bukunya Sistem Informasi Modern, memberikan definisi SIM sebagai berikut:

SIM adalah suatu kelompok orang, seperangkat pedoman, dan petunjuk peralatan pengolahan data (seperangkat elemen),

²⁹ Lantip Diat Prasajo, Teknologi Informasi Pendidikan (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 151-152.

³⁰ Eti Rochaety, Sistem Informasi Manajemen (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 12.

memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data (mengoperasikan data dan barang) untuk mengurangi ketidakpastian pada pengambilan keputusan (mencari tujuan bersama) dengan menghasilkan informasi untuk manajer pada waktu mereka dapat menggunakannya dengan paling efisien (menghasilkan informasi menurut waktu rujukan).³¹

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Sedangkan jenis sistem secara umum terdiri dari sistem terbuka dan sistem tertutup (Open-Loop and Closed – Loop System). Sistem terbuka adalah sistem yang memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik. Sedangkan sistem yang tertutup, yaitu sebuah sistem yang memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik.

Dari kedua jenis sistem tersebut dapat dibedakan secara jelas bahwa sistem terbuka tidak memiliki sasaran, kontrol mekanis, maupun umpan balik. Sebaliknya untuk jenis sistem tertutup masing – masing memiliki sasaran yang jelas, pengendalian mekanis, dan umpan balik.

Sistem informasi merupakan kumpulan komponen dalam sebuah organisasi atau lembaga yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Keandalan suatu sistem informasi dalam sebuah lembaga/ organisasi terletak pada

³¹ Ibid, 12-13.

keterkaitan antar komponen yang ada sehingga dapat menghasilkan aliran informasi yang berguna, akurat terpercaya, detail, cepat, relevan bagi kepentingan lembaga tersebut.³² Sebuah sistem terdiri dari bagian – bagian saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran, berarti sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tak teratur, tetapi terdiri dari unsur yang dapat dikenal sebagai bagian yang saling melengkapi karena mempunyai sasaran dan tujuan yang sama.³³

b. Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.³⁴

Menurut McLeod :

Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dengan adanya sistem yang baik diharapkan dapat menghasilkan suatu informasi yang berkualitas tinggi. Informasi yang baik tersebut mempunyai kriteria sebagai berikut, relevan, akurat, tepat waktu, ringkas, jelas, dapat diukur, dan konsisten.³⁵

³² Eti Rochaety, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 3-4.

³³ Deni Darmawan, Sistem Informasi Manajemen (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 25.

³⁴ Ibid, 26.

³⁵ Ariesto Hadi Sutopo, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 90.

Onong Uchjana Effendi mengatakan informasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam dalam ruang lingkup manajemen. Adapun jenis – jenis informasi tersebut sebagai berikut.³⁶

- 1) Informasi berdasarkan persyaratan, yaitu suatu informasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh seorang pemimpin dalam rangka pengambilan keputusan yang harus segera dilakukan. Informasi berdasarkan persyaratan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a) Informasi yang tepat waktu, yaitu harus sampai pada pimpinan sebelum pengambilan keputusan.
 - b) Informasi yang relevan, yaitu informasi yang berharga untuk suatu pengambilan keputusan.
 - c) Informasi yang dapat dipercaya, yaitu suatu informasi harus dapat dipercaya dalam manajemen.
- 2) Informasi berdasarkan dimensi waktu. Informasi yang berdasarkan dimensi waktu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:
 - a) Informasi masa lalu
 - b) Informasi masa kini
- 3) Informasi berdasarkan sasaran, yaitu informasi yang ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang, baik yang terdapat di dalam

³⁶ Lantip Diat Prasajo, *Teknologi Informasi Pendidikan* (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 167.

organisasi maupun diluar organisasi. Informasi jenis ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- a) Informasi individual, yaitu informasi yang ditujukan kepada seseorang yang mempunyai fungsi sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.
- b) Informasi komunitas, yaitu informasi yang ditujukan kepada masyarakat di luar organisasi.
- c. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan – tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran – sasaran yang sudah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya.³⁷

Pada dasarnya dalam proses penggunaan sistem informasi, seorang manajer sebelumnya harus memahami posisi dari tingkatan manajemen di mana dia berada. Posisi tersebut sangat berpengaruh terhadap sumber dan bentuk informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer (pimpinan) sebagai bahan proses pengambilan keputusan.³⁸

- d. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

³⁷Ibid, 166.

³⁸ Eti Rochaety, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 4-5.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah kumpulan dari manusia dan sumber – sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. SIM merupakan suatu sistem yang secara spesifik dirancang untuk mengarahkan jumlah – jumlah besar dan banyaknya jenis informasi dalam suatu organisasi.

Menurut Murdick dalam bukunya Sistem Informasi Modern, memberikan definisi SIM sebagai berikut.

SIM adalah suatu kelompok orang, seperangkat pedoman, dan petunjuk peralatan pengolahan data (seperangkat elemen) memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data (mengoperasikan data dan barang) untuk mengurangi ketidakpastian pada pengambilan keputusan (mencari tujuan bersama) dengan menghasilkan informasi untuk manajer pada waktu mereka dapat menggunakannya dengan paling efisien (menghasilkan informasi menurut waktu rujukan).³⁹

Sistem Informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi. Informasi sendiri mengandung suatu arti yaitu data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data sendiri

³⁹ Deni Darmawan, Sistem Informasi Manajemen (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 14.

merupakan fakta – fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.

Sistem informasi mengandung tiga aktivitas dasar di dalamnya, yaitu: aktivitas masukan (input), pemrosesan (processing), dan keluaran (output). Tiga aktivitas dasar ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk pengambilan keputusan, pengendalian operasi, analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. Masukan berperan di dalam pengumpulan bahan mentah (raw data), baik yang diperoleh dari dalam maupun dari lingkungan sekitar organisasi. Pemrosesan berperan untuk mengkonversi bahan mentah menjadi bentuk yang lebih memiliki arti. Sedangkan, keluaran dimaksudkan untuk mentransfer informasi yang diproses kepada pihak – pihak atau aktivitas – aktivitas yang akan menggunakan. Sistem informasi juga membutuhkan umpan balik (feedback), yaitu untuk dasar evaluasi dan perbaikan ditahap input berikutnya.⁴⁰

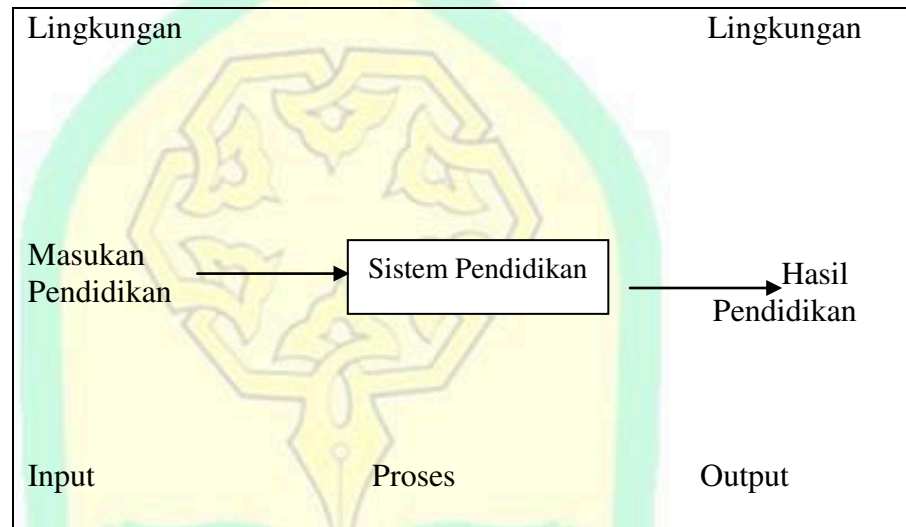
⁴⁰ Sri Dewi Anggadini, “Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer dalam Proses Pengambilan Keputusan,” *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 11 (2013), 179.

Dalam suatu SIM, data dikumpulkan, diorganisasikan, diproses dan dibuat agar mudah diperoleh bagi manajer agar informasi menjadi alat bantu dalam tugas – tugas operasional manajer sehari – hari. Dengan adanya SIM yang baik, maka pengembangan dan kelangsungan hidup suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, maka keberadaan SIM berbasis komputer dalam suatu organisasi sangat diperlukan.⁴¹

Kehidupan bangsa merupakan lingkungan pendidikan dan suprasistem dari sistem pendidikan yang bekerja bersama – sama dengan sistem lainnya (misalnya ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan sebagainya) dalam mencapai tujuan rasional. Pendidikan sebagai sistem dapat digambarkan dalam bentuk model dasar input – output. Segala sesuatu yang masuk (input) dalam sistem dan berperan dalam proses pendidikan disebut masukan pendidikan. Lingkungan hidup dan masyarakat pengguna menjadi sumber masukan pendidikan. Menurut P. H. Coombs dan W. J.Platt (1968) mengemukakan tiga macam sumber masukan pendidikan yang terdiri atas:

⁴¹ Lantip Diat Prasajo, Teknologi Informasi Pendidikan (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 169-170.

Tiga sumber masukan pendidikan yaitu (1) pengetahuan, nilai – nilai, dan cita – cita yang terdapat di dalam masyarakat; (2) penduduk dan persediaan layanan belajar dan lulusan sebagai output berupa tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan juga tenaga ahli diberbagai bidang keahlian; dan (3) hasil produksi pendidikan dan penghasilan berupa outcome.



Gambar 2.1 Model Input – Output Pendidikan

Artinya sumber pengetahuan dan nilai – nilai yang dikembangkan dalam dunia pendidikan harus sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat dimana sekolah itu berada. Bentuk masukan atau input pendidikan dalam sistem pendidikan dapat berupa informasi (pengetahuan, teknologi, nilai – nilai, dan cita – cita) yang tercermin dalam kurikulum yang dapat dielaborasi menjadi bahan ajar, tenaga guru dan tenaga kependidikan (penduduk atau masyarakat dan tenaga kerja) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan seperti pemerintah di pusat dan daerah provinsi

maupun kabupaten/ kota, kepala sekolah dan personal lainnya di sekolah, barang (sarana pendidikan, fasilitas belajar, dan perlengkapan), hal – hal yang terdapat dalam lingkungan tidak semuanya dan dengan sendirinya dapat menjadi masukan pendidikan. Pengambilan masukan pendidikan melalui proses seleksi yang didasarkan kriteria dan standar tertentu akan lebih memberi jaminan akan mutu pendidikan. Misalnya tidak segala macam pengetahuan yang ada dalam masyarakat dapat menjadi bahan ajar atau bagian dari kurikulum, dan tidak semua penduduk atau masyarakat dengan sendirinya menjadi siswa atau guru, tentu harus dilakukan seleksi mengacu pada kriteria dan standar mutu minimal yang telah ditentukan dan dipersyaratkan. Jika anak kurang cerdas tentu ada model manajemen yang sesuai untuk itu, demikian juga bagi anak cerdas tentu ada model manajemen yang sesuai untuk itu. Tegasnya manajemen dapat disesuaikan dengan siapa dan bagaimana peserta didiknya demikian juga kurikulum dan materi pelajarannya.⁴²

e. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

Lingkungan internal maupun eksternal lembaga pendidikan selalu berkembang dan bersifat dinamis sehingga menimbulkan

⁴² Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 16-17.

kesempatan atau hambatan bagi pertumbuhan lembaga pendidikan tersebut. Penyebab lainnya adalah keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen. Manajemen pendidikan mempunyai tugas membuat keputusan, tetapi tugas ini merupakan aspek kritis yang menuntut kemampuan manajerial untuk mengintegrasikan dan mengembangkan berbagai elemen yang relevan ke dalam situasi lembaga pendidikan secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya pihak manajemen akan dihadapkan pada terbatasnya waktu, risiko yang mungkin mengancam stabilitas lembaga pendidikan, dan keputusan yang diambil harus dapat dikomunikasikan pada pihak pelaksana (petugas operasional), seperti pendidik dan tenaga kependidikan.⁴³

Salah satu agenda reformasi pendidikan adalah perbaikan mutu pendidikan yang dimulai dari tingkat prasekolah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi dan kegiatan non – formal di dalam kehidupan masyarakat. Masing – masing tingkatan memiliki karakteristik dan aturan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Manajemen dalam pendidikan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan global yang disertai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Perubahan itu sendiri sangat cepat dan pesat,

⁴³ Eti Rochaety, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 27.

sehingga perlu ada perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement) di bidang pendidikan sehingga output pendidikan dapat bersaing dalam era globalisasi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi.

Persaingan tersebut hanya mungkin dimenangkan oleh lembaga pendidikan yang tetap memperhatikan kualitas/ mutu pendidikan dalam pengelolaannya. Suatu sistem pendidikan dapat dikatakan berkualitas/ bermutu, jika proses belajar – mengajar berlangsung secara menarik dan menantang sehingga peserta didik dapat belajar sebanyak mungkin melalui proses belajar yang berkelanjutan. Proses pendidikan yang bermutu akan membuahkan hasil pendidikan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan efisien perlu disusun dan dilaksanakan program – program pendidikan yang mampu membelajarkan peserta didik secara berkelanjutan, karena dengan kualitas pendidikan yang optimal, diharapkan akan dicapai keunggulan sumber daya manusia yang dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

Oleh karena itu demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas, diperlukan manajemen pendidikan yang dapat menggerakkan segala sumber daya pendidikan. Manajemen

pendidikan itu terkait dengan manajemen peserta didik yang isinya merupakan pengelolaan dan juga pelaksanaannya. Manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Manajemen pendidikan untuk saat ini merupakan hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan output yang berkualitas tinggi.⁴⁴

f. Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)

1) Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer

Informasi disajikan dalam bentuk lisan maupun tertulis oleh suatu pengolahan informasi. Porsi komputer dalam mengolah informasi terdiri dari bidang aplikasi berbasis komputer, seperti: management information system (MIS), decision support system (DSS), kantor virtual, dan sistem berbasis pengetahuan. Kita menggunakan istilah sistem informasi berbasis komputer atau CBIS untuk menggambarkan semua aplikasi bisnis tersebut yang

⁴⁴ Deni Darmawan, Sistem Informasi Manajemen (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 40-41.

prosesnya dilakukan dengan bantuan komputer dan tidak dengan cara manual.

Dari uraian di atas, maka sistem informasi manajemen berbasis komputer didefinisikan sebagai suatu sistem yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menyediakan informasi yang penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan bantuan komputer.

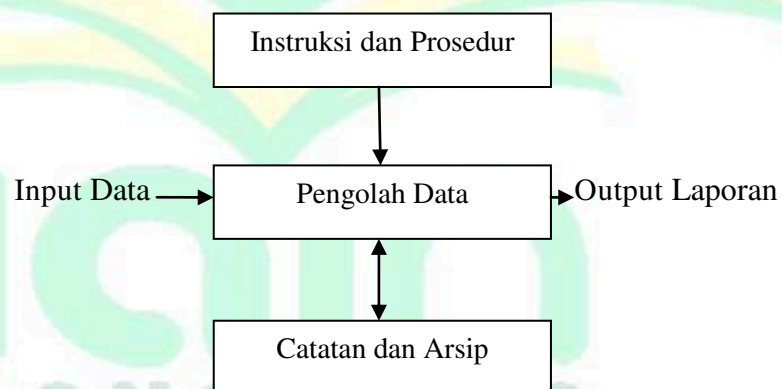
Sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam kenyataannya banyak membantu pekerjaan manusia, jika dibandingkan dengan sistem informasi yang masih menggunakan cara – cara manual. Sebagai contoh adalah penyediaan informasi akademik yang berkaitan dengan data mahasiswa dapat dilakukan dengan cepat, sehingga mutu layanan kepada mahasiswa dapat ditingkatkan. Layanan nilai mahasiswa dapat dilihat sewaktu – waktu melalui komputer yang terhubung dengan komputer server dan langsung dapat dicetak. Keberadaan sistem informasi manajemen berbasis komputer memang dirasa perlu bagi organisasi – organisasi dalam rangka peningkatan mutu layanan dan pengembangan diri untuk menghadapi persaingan global.⁴⁵

⁴⁵ Lantip Diat Prasojo, Teknologi Informasi Pendidikan (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 173.

2) Mekanisme Kerja SIM Berbasis Komputer

Sebuah sistem informasi manajemen, baik sistem informasi manual maupun yang dilengkapi dengan sistem komputer, memiliki komponen dasar yang sama, yaitu masukan berupa bahan informasi/ data, pengolahan data, instruksi dan prosedur, keluaran serta catatan – catatan dan arsip. Bahan informasi ini yang akan diolah menjadi suatu informasi yang berguna bagi manusia. Proses pengolahan data ini dilakukan dalam suatu mekanisme kerja SIM.

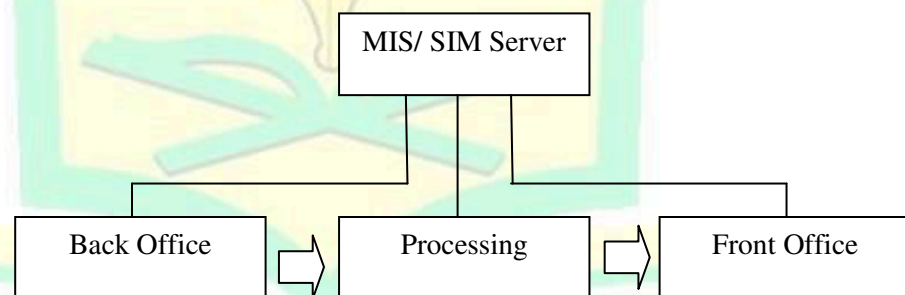
Murdick menyatakan “komponen – komponen sistem informasi manajemen dibagi menjadi lima bagian, yaitu: input data, pengolahan data, catatan dan arsip, instruksi dan prosedur, dan output”. Mekanisme kerja SIM ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut ini.⁴⁶



Gambar 2.2 Komponen – Komponen SIM

⁴⁶ Ibid, 172.

Sebagai sebuah mekanisme kerja, fungsi – fungsi pokok SIM dapat diilustrasikan sebagai sebuah alur kerja, yaitu memasukkan data ke dalam sistemnya, kemudian data tersebut diolah dengan menyusun kembali data input dan arsip–arsip penyimpanan. Langkah berikutnya, mengembangkan prosedur – prosedur yang akan menentukan data mana yang akan diperlukan, kapan dan dimana data itu dapat diperoleh, untuk apa data itu dipergunakan, serta memberikan instruksi yang harus diikuti oleh pengolahnya, dan langkah terakhir adalah menyiapkan output laporannya.⁴⁷



Gambar 2.3 Mekanisme Kerja SIM

Peranan teknologi informasi sangat penting dalam pengembangan dunia pendidikan. Peran tersebut dapat dilihat dari banyaknya manfaat yang dapat diambil dari implementasi teknologi informasi untuk mendukung pengembangan pendidikan, seperti implementasi sistem informasi akademik,

⁴⁷ Ibid, 174-176.

sistem informasi keuangan, pemanfaat LAN, Internet, dan lain – lain.

Peranan SIM berbasis komputer dalam bidang pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Implementasi sistem informasi akademik (Siakad)
2. Implementasi sistem informasi keuangan (Sikeu)
3. Implementasi sistem informasi kepegawaian (Sikep)
4. Sistem basis data
5. Implementasi WAN dan LAN
6. Implementasi sistem informasi perpustakaan
7. Dan lain sebagainya.⁴⁸

D. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Adanya judul penelitian penjaminan mutu pendidikan ini bukan penelitian yang baru, melainkan penelitian yang sudah mengacu pada penelitian yang serupa dengan penelitian sebelumnya, diantaranya adalah :

Penelitian Nur Abidin Mahasiswa STAIN Ponorogo tahun 2011 dengan judul penelitian “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Ma’arif Cekok, Babadan, Ponorogo”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah memerlukan manajemen yang sesuai dengan sekolah agar membantu sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Meskipun

⁴⁸Ibid, 176-177.

belum seluruhnya berjalan maksimal, namun usaha sekolah dalam mengatur sekolah menjadikan sekolah lebih meningkat terutama dalam masalah mutu pendidikan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah strategi yang digunakan dalam meningkatkan mutu yaitu dengan mengembangkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) sedangkan penelitian di SMPN 1 Sambit menggunakan program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan).

Kemudian penelitian yang kedua adalah Skripsi Fifi Fitriyah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 yang berjudul "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Pelayanan Sekolah Terhadap Masyarakat pada Website SMA *Bakti Mulya 400*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuannya untuk mengetahui manfaat Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk melayani masyarakat dengan memberikan informasi menggunakan website. Tujuannya untuk memudahkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Penelitian ini hampir sama yaitu terkait penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam memberikan informasi perbedaannya terletak pada programnya yaitu menggunakan website dan Program PMP.

Kemudian penelitian yang ketiga adalah Skripsi Alfiana Rizky Hertriani mahasiswa STAIN Ponorogo tahun 2014 yang berjudul "*Manajemen Mutu Pendidikan di STAIN Ponorogo Tahun Akademik 2013/2014*".

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan diperlukan manajemen ataupun cara dalam memantau pelaksanaan atau implementasi dari mutu dalam suatu lembaga. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dari manajemen ataupun cara dalam meningkatkan mutu sekolah/ lembaga yaitu dengan cara meningkatkan mutu pembelajaran di STAIN dan juga dengan cara menerapkan program PMP berbasis SIM di SMPN 1 Sambit Ponorogo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian kualitatif memiliki karakteristik – karakteristik dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata – kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, penelitian kualitatif lebih menekankan proses daripada produk, penelitian kualitatif melakukan analisis secara induktif, penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).⁴⁹

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu uraian penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial.⁵⁰ Adapun subjek dari penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wa. ka Kurikulum, Tata Usaha, Guru PAI, Siswa

⁴⁹Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 9-10.

⁵⁰ DedyMulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 201.

dan seluruh program yang berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM).

B. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan sekenarionya⁵¹

Dalam penelitian ini peneliti sebagai aktor sekaligus sebagai pengumpul data, dan peran peneliti sebagai partisipan pasif dengan melakukan pengamatan akan tetapi tidak berperan serta yaitu peneliti melakukan interaksi sosial dengan dengan subyek yang diteliti dalam waktu yang bersifat sementara, dan dalam bentuk catatan lapangan disusun secara sistematis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di SMPN 1 Sambit Ponorogo. Pemilihan lokasi ini berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian ini yaitu didasarkan pada fakta bahwa di sekolah ini terdapat program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka memberikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk membantu memudahkan penyaluran informasi terkait program

⁵¹Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2003), 3.

Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan 8 standar Nasional pendidikan di SMPN 1 Sambit Ponorogo. SMPN 1 Sambit merupakan sekolah tertua di kawasan sambit dan sekitarnya. Sekolah ini mempunyai guru – guru dan staf – staf yang tidak pernah goyah dari kursi kepegawaian sejak tahun 1991 yaitu awal dari SMPN 1 Sambit ini menetap di Desa Campursari Kecamatan Sambit sampai sekarang ini. Perkembangannya yang cukup pesat membuat SMPN 1 Sambit unggul dalam berbagai bidang. Meskipun didampingi oleh guru – guru yang notabene sudah berumur tetapi prestasi SMPN 1 Sambit selalu membuat sekolah ini tak pernah berhenti berkembang hingga saat ini.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata – kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata – kata dan tindakan sebagai sumber data utama, sedangkan data tertulis adalah sebagai sumber data tambahan.⁵²

Data primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Sekolah yang bernama Bapak Darul Khoiri, untuk memperoleh data mengenai upaya yang dilakukan Sekolah dalam menerapkan sistem

⁵² SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 2006), 156.

- informasi manajemen (SIM) berupa program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan).
- b. Wa.ka Kurikulum yang bernama Ibu Enok, untuk memperoleh data mengenai bagaimana upaya yang dilakukan Guru dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berupa program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) serta implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) ketika dilaksanakan di sekolah.
 - c. Tata Usaha yang bernama Ibu Ruchotin, untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi manajemen di SMPN 1 Sambit.
 - d. Guru PAI yang bernama Bapak Nur Hadi, untuk mengetahui kontribusi dari program PMP dalam meningkatkan pembelajaran PAI.
 - e. Siswi SMPN 1 Sambit yang bernama Rani Nurrenza, untuk mengetahui peningkatan mutu sekolah setelah dilaksanakan program PMP.

Sedangkan data sekunder merupakan data kepustakaan penulis, yang diperoleh dari literatur – literatur tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, data sekunder dalam penelitian ini adalah data tertulis terkait dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang di terapkan di SMPN 1 Sambit Ponorogo, foto – foto sebagai bukti Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang sudah di terapkan di SMPN 1 Sambit Ponorogo dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (openended interview), wawancara etnografis: sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized interview), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan – pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.⁵³

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber antara lain :

1. Kepala sekolah yang bernama Bapak Darul Khoiri, untuk memperoleh data mengenai upaya yang dilakukan Sekolah dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM).

⁵³ DeddyMulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi, 160.

2. Wa.ka Kurikulum yang bernama Ibu Enok untuk memperoleh data mengenai bagaimana upaya yang dilakukan dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM).
3. Tata Usaha yang bernama Ibu Ruchotin, untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit.
4. Guru PAI yang bernama Bapak Nur Hadi, untuk mengetahui kontribusi dari program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dalam meningkatkan pembelajaran PAI.
5. Siswi SMPN 1 Sambit yang bernama Rani Nurrenza, untuk mengetahui peningkatan mutu sekolah setelah dilaksanakan program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP).

2. Teknik Observasi

Dalam penelitian kualitatif observasi diklasifikasikan menurut tiga cara. Pertama, pengamat dapat bertindak sebagai seorang partisipan atau non partisipan. Kedua, observasi dapat dilakukan secara terus terang atau penyamaran. Ketiga, observasi yang menyangkut latar penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi yang pertama, dimana pengamat bertindak sebagai partisipan.

Dengan teknik ini, peneliti mengemukakan aktifitas – aktifitas sehari – hari obyek penelitian, karakteristik fisik, situasi sosial, dan

perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. Selama peneliti di lapangan, jenis observasinya tidak tetap. Dalam hal ini peneliti mulai dari observasi deskriptif (descriptive observations) secara luas, yaitu berusaha melukiskan secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi disana. Kemudian, setelah perekaman dan analisis data pertama, peneliti menyempitkan pengumpulan datanya dan mulai melakukan observasi terfokus (focused observations). Dan akhirnya, setelah dilakukan lebih banyak lagi analisis dan observasi yang berulang – ulang di lapangan, peneliti dapat menyempitkan lagi penelitiannya dengan melakukan observasi selektif (selective observations). Sekalipun demikian, peneliti masih terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data.

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangkopengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item – item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.⁵⁴

3. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁵⁵

⁵⁴ SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 204.

⁵⁵ *Ibid.*, 206.

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insan, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman."Rekaman" sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan "dokumen" digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat – surat, buku harian, catatan khusus, foto – foto dan sebagainya.⁵⁶

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini sebab; pertama, sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi waktu, kedua, rekaman dan dokumentasi merupakan sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi di masa lampau maupun dapat dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan; ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya; keempat, sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini dicatat dalam format rekaman dokumentasi.

⁵⁶ Ibid., 161.

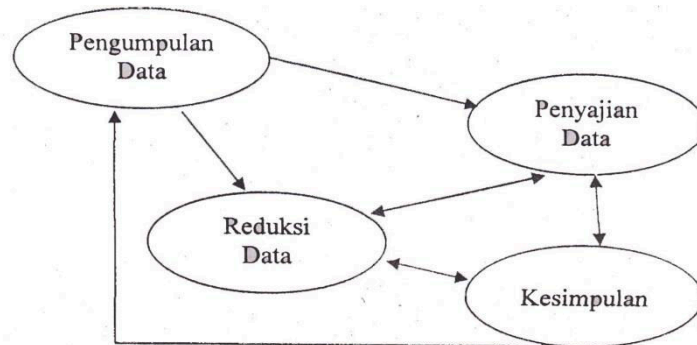
F. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁷

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi: data reduction, data display, dan conclusion. Langkah – langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut.⁵⁸

⁵⁷ Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin), (Ponorogo:P2MP STAIN Ponorogo, 2010), 40-41.

⁵⁸ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 183.



Keterangan:

- a. Mereduksi data dalam konteks penelitian reduksi data adalah merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya.
- b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network, dan chart. Bila pola – pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut telah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian.
- c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁵⁹ Penarikan kesimpulan yang

⁵⁹ Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin), 42.

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang dinilai dari pernyataan atau fakta – fakta khusus menuju pada kesimpulan umum.⁶⁰

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk menguji keabsahan temuan atau kesalihan hasil penelitian ini, maka penulis akan berusaha untuk membacakan atau akan mendiskusikan lagi hasil penelitian beserta kesimpulannya kepada key informan (informan kunci), yaitu Kepala Sekolah yaitu Bapak Drs. Darul Khoiri yang mengatur terkait program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) di sekolah yang dianggap dapat memberikan komentar dan statemen tentang kebenaran yang diungkap dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu.⁶¹

H. Tahapan – Tahapan Penelitian

Tahap – tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian 3 yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap – tahap penelitian tersebut adalah:

⁶⁰ Ibid., 41-42.

⁶¹ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 127.

1. Tahap Pra Lapangan

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan.

Tahap pra lapangan ini meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penulsuran awal dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.⁶²

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dengan membawa desain yang dirancang sedemikian rupa bisa saja tidak sesuai dengan situasi nyatanya. Pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, mungkin tidak mempunyai relevansi dengan situasi objek yang diteliti. Dalam menghadapi hal ini, peneliti harus memulai membuat formulasi desain yang baru lagi (new research design) atau teknik baru lagi dan mulai menyusun pertanyaan – pertanyaan berbeda dalam berbagai hal serta meninggalkan situasi yang satu kesituasi yang lain.⁶³

Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 85-93.

⁶³ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, (Malang: Kalimasada, 1996), 40-41.

mengumpulkan data.⁶⁴

3. Teknik Analisis Data

Dalam tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap data – data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pekerjaan analisis ini meliputi: mengatur, mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit – unit, melakukan sintesa, memilih nama yang penting dan membuat kesimpulan.

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan

Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.

Penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas dari keseluruhan tahapan kegiatan dan unsur – unsur penelitian. Kemampuan melaporkan hasil penelitian merupakan suatu tuntutan mutlak bagi peneliti. Dalam hal ini penelitian hendaknya tetap berpegang teguh sehingga ia membuat laporan apa adanya, objektif walaupun dalam banyak hal ia akan menghadapi kesulitan.⁶⁵

⁶⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 94-102.

⁶⁵ LexyMoleong, Metodologi Penelitian, 215-216

BAB IV

DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Berdirinya SMPN 1 Sambit Ponorogo

SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo merupakan salah satu SMP favorit yang ada di Ponorogo, terletak di Jl. Pajajaran No 11 Campursari, Sambit, Ponorogo.

Sebelum menjadi SMPN 1 Kec.Sambit, awal mula bernama Sekolah Teknologi (ST) Filial ST Negeri 2 Ponorogo Tanggal – Bulan Januari Tahun 1968 beralamatkan di Dusun Tamansari, Sambit, Ponorogo. Selanjutnya ST Negeri 2 Ponorogo di Sambit, berintegrasi menjadi SMP 4 Ponorogo Tanggal 1 April 1979 setelah melalui proses tanggal 9 Oktober 1982 dari SMP 4 Ponorogo menjadi SMP 1 Sambit. Berdasarkan SK Pendirian Nomor : 0299/ 0/ 1982 tanggal 9 Oktober 1982. Pada tahun 1991 alamat sekolah berpindah ke desa Campursari Kecamatan Sambit Ponorogo.

Perkembangannya cukup bagus karena memang dulu dari awal SMPN 1 sambit ini masing – masing rombel hanya 3 kelas dulu hanya ada kelas A,B,C saja masing – masing angkatan 3 tapi kenyataannya sejalan dengan perkembangan penerimaannya menjadi 4 kelas kemudian bertambah menjadi 5 sehingga akhirnya kita harus menambah gedung – gedung lagi sebelah utara 2 barat 2 ada juga yang 3 itu sudah cukup kalau dulu tapi sekarang bertambah sampai belakang. Karena dulu sekolah ini diproyeksikan untuk 9

kelas tetapi ternyata lebih. Perkembangan SMPN 1 Sambit cukup bagus dari 9 kelas menjadi 15 kelas.⁶⁶

2. Letak Geografis SMPN 1 Sambit Ponorogo

SMP Negeri 1 Kec.Sambit terletak di Desa Campursari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Lebih tepatnya berada di Jalan Pajajaran No. 11 Desa Campursari, Sambit, Ponorogo.

Dari pusat Kota Ponorogo sejauh kurang lebih 15 km. Lokasi cukup strategis, berada dekat jalur Jalan Raya Ponorogo – Trenggalek, sehingga mudah dijangkau dengan sarana transportasi umum. Kondisi lingkungan sekolah yang tenang dan jauh dari kebisingan memungkinkan situasi pembelajaran yang kondusif.⁶⁷

Adapun koordinat SMPN 1 Kec.Sambit berada pada

: Koordinat: 7°57'4''S 111°29'49''E.

Di SMPN 1 Sambit terdapat nama – nama Kepala Sekolah yang dahulu pernah menaungi SMPN 1 Sambit baik sebelum dan sesudah menjadi SMPN 1 Sambit, yaitu :

- a. Selan Susanto (ST Negeri 2 Ponorogo)
- b. Musyirin B.A AN Agoes Soekarini : Soebono (SMP 4 Ponorogo)
- c. Soelekan, B.A : Wakim, B.A : Sajuti Ichwan : Haryono, SP. D : Didik Yudi Astuti, SP.d

⁶⁶Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/10-06/2017.

⁶⁷Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/10-06/2017.

d. Drs. Darul Khoiri (SMPN 1 Kecamatan Sambit), sampai sekarang.

3. Visi Misi SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo

Dalam menyelenggarakan aktifitas akademisnya, SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo memiliki visi dan misi serta tujuan yang mulia, tidak hanya memperhatikan aspek akademis namun juga memperhatikan aspek etika. Adapun visi, misi dan tujuan dari SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo adalah sebagai berikut:

a. Visi

Cerdas, Terampil dan Berbudi Luhur Serta Berbudaya Lingkungan Berdasar Iman dan Takwa.

b. Misi

- 1) Mengembangkan KTSP yang berdiversifikasi dengan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada siswa sesuai dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa serta tuntutan lingkungan.
- 2) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan nonkonvensional diantaranya CTL, PAKEM (Pembelajaran, Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan).
- 3) Meningkatkan GSA (Gain Score Achievement) Ujian Nasional.
- 4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pendidik dan tenaga kependidikan.

- 5) Melaksanakan pengembangan fasilitas pendidikan (perangkat teknologi).
- 6) Melaksanakan pengembangan Manajemen Pendidikan.
- 7) Melaksanakan pengembangan partisipasi stake holder terhadap sekolah.
- 8) Melaksanakan pengembangan media pembelajaran.
- 9) Melaksanakan pengembangan proses dan strategi penilaian.
- 10) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama.
- 11) Melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)

c. Tujuan

Pada akhir tahun pelajaran 2015 / 2016 sekolah dapat :

- 1) Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi silabus tiap mata pelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa dan sistem Penilaian.
- 2) Mewujudkan pelaksanaan pembelajaran dengan metode pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM).
- 3) Meningkatkan prestasi akademik dengan nilai NUN sesuai dengan Standar Minimal Kelulusan.
- 4) Mewujudkan tercapainya standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang telah ditentukan.
- 5) Meningkatkan penguasaan teknologi informasi dasar.

- 6) Meningkatkan pencapaian standar pengelolaan sekolah dengan manajemen berbasis sekolah.
- 7) Mewujudkan partisipasi stake holder terhadap sekolah.
- 8) Mengembangkan pembelajaran yang multimedia dan multi strategi.
- 9) Mengembangkan sistem penilaian untuk seluruh mata pelajaran sesuai standar nasional.
- 10) Membekali siswa agar dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari melalui Sholat berjamaah, baca tulis Al – qur'an dan kegiatan keagamaan lainnya.
- 11) Menanamkan pada diri siswa untuk mencintai lingkungan sekitar melalui pembelajaran kontekstual dengan lingkungan sekolah.
- 12) Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup sekolah yang hijau, bersih, sehat dan indah.
- 13) Terwujudnya penanggulangan kerusakan lingkungan sekolah dan sekitar.
- 14) Terwujudnya pencegahan pencemaran lingkungan sekolah dan sekitar.⁶⁸

B. Deskripsi Data Khusus

Adapun pelaksanaan Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit Ponorogo yaitu dengan melaksanakan program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) yang

⁶⁸Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/10-06/2017.

diberikan oleh pemerintah berupa aplikasi Dapodik yang harus diisi oleh seluruh sekolah yang datanya terdaftar dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Pelaksanaan program tersebut sangat berguna bagi sekolah sebagai sarana untuk mengevaluasi mutu sekolah yang masih belum mencapai tujuan yang diharapkan sekolah. Setelah program tersebut dilaksanakan di sekolah, sekolah mengadakan evaluasi program dalam rangka memperbaiki kualitas mutu di sekolah baik dari segi tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, kurikulum sekolah, dan lain sebagainya.

Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis SIM di SMPN 1 Sambit Ponorogo dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, PTK, komite, siswa, serta masyarakat sekitar. Seluruh komponen sekolah juga ikut berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 1 Sambit Ponorogo.⁶⁹

1. Respon Sekolah Terhadap Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit Ponorogo

Adanya program Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) sendiri membawa dampak yang berbeda – beda pada setiap sekolah yang melaksanakannya. Ada sekolah yang menerima dengan senang hati terkait program tersebut tetapi ada juga yang terpaksa karena memang program ini merupakan program baru yang memerlukan pelatihan khusus agar tidak salah dalam melaksanakannya. Reaksi awal sekolah

⁶⁹ Lihat transkrip observasi nomor: 02/O/13-05/2017.

terhadap pelaksanaan program PMP kaget dikarenakan belum siapnya sekolah dalam melaksanakan program baru yang diinstruksikan oleh Pemerintah yaitu Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional).

Seperti hasil wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak

Darul Khoiri :

Pada awalnya kami merasa kaget, karena disaat itu sekolah sedang sibuk mengurus persiapan ujian tengah semester atau UTS jadi ya kami kebingungn membagi waktu tapi meskipun awalnya kaget dengan surat edaran yang diberikn oleh Dapodik (Data Pokok Pendidik), kami tetap melaksanakan program tersebut dengan patuh karena itu memang sudah sebuah program yang harus dijalankan oleh semua sekolah. Meskipun demikian kami juga mendapatkan kontribusi yang banyak karena adanya program PMP(Penjaminan Mutu Pendidikan) tersebut, diantaranya bisa mengukur seberapa baik mutu sekolah yang telah dicapai apakah sudah sesuai dengan standar mutu pendidikan Nasional. Jadi bisa digunakan untuk evaluasi sekolah terkait apasaja yang harus dilengkapi atau disempurnakan baik dari program – program yang telah ada maupun program yang baru. Jadi ya meskipun dibilang iya dengan terpaksa tetapi melihat hasil yang dikeluarkan dari program tersebut sekolah mendapatkan kontribusi yang sangat banyak jadi no problem.⁷⁰

Evaluasi sangatlah penting dalam rangka mengukur mutu sekolah seperti di SMPN 1 Sambit juga mengalami kekurangan didalam program sarana dan prasarana sekolah seperti ruang keterampilan, kesenian, dan juga ruang laboratorium.⁷¹ Akan tetapi dengan adanya program PMP akan membantu sekolah dalam memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang.

⁷⁰Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/10-06/2017.

⁷¹ Lihat transkrip dokumentasi nomor : 02/D/13-05/2017.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bu Enok selaku Wa.Ka Kurikulum sekolah :

Saya rasa kalau masalah program baru ini dari sekolah sendiri oke – oke saja, karena memang sebuah instruksi dari pemerintah apalagi dari Dinas Pendidikan ya pasti tentunya mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu sekolah. Memang suatu manajemen itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi, kalau dulu hanya bisa menilai mutu secara manual (EDS) tetapi sekarang lebih canggih lagi yaitu menggunakan IT yaitu SIM itu sendiri, dari pemerintah juga menciptakan suatu program baru yaitu program PMP. Saya sebagai kurikulum sekolah juga terkadang bingung cara memperbaiki ataupun menilai suatu program, karena kita tidak bisa mengukur dengan hanya perkiraan saja tetapi rilnya tidak tahu. Dengan program PMP ini kita tahu dimana posisi sekolah kita saat ini dan apa saja program sekolah yang perlu diperbaiki lagi. Kalau kita mau kita juga bisa melihat posisi sekolah kita diantara sekolah – sekolah lain yang setara di Ponorogo, tetapi mungkin itu belum ada karena raportnya saja baru terbit bulan kemarin. Tetapi karena ini sebuah program, jadi ya pasti dapat dilihat secara otomatis. Kalau saya pribadi, reaksi sekolah terhadap program PMP itu tergantung dari masing – masing individu yang menyikapinya, kalau memang ingin sekolahnya maju, harusnya menerima dengan senang hati dengan adanya program tersebut tetapi kalau individunya malas atau bsrikapacuh tak acuh terhadap sekolah yang pasti tidak mau tahu akan adanya perbaikan bagus atau tidak terserah itu menurut saya pribadi.⁷²

Reaksi sekolah terhadap adanya program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) berbeda – beda. Seperti hasil wawancara kepada Ibu Ruchotin:

Program PMP kemarin memang sempat membuat kaget sekolah terutama saya sendiri, karena memang belum siapnya sekolah untuk menerima program tersebut, saya katakana demikian karena memang dari sekolah belum bisa membagi waktu, karena memang masih repot sekali dan ketika program datang kan kita harus menyiapkan segalanya baik itu penanggung jawab, alatnya, koordinatornya, yang menjalankan dan lain sebagainya. Sebenarnya yang saya katakan belum siap tetapi karena memang bersamaan dengan UTS jadi sangat ribet sekali apalagi saya kemarin bertugas mendampingi Pak Agung untuk mengoperasikan komputer dan banyak sekali kendalanya

⁷²Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/13-05/2017.

diantaranya konektivitas internet yang lemotjadinya loading lalu belum lengkapnya angket yang diisi jadi ada beberapa angket yang belum terisi sempurna, dan ketika data belum lengkap data tidak akan bisa terkirim karena datanya belum lengkap. Meskipun ada perpanjangan dari pusat tetapi juga menghambat proses pemasukan data.⁷³

Berbeda lagi dengan yang dikatakan Bapak Nur Hadi yang sangat antusias dengan adanya program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan). Menurut beliau program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) sangat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan mutu sekolah. Apalagi program agama yang masih kurang di SMPN 1 Sambit.

Seperti hasil wawancara kepada Bapak Nur Hadi berikut ini:

Pendidikan agama di SMPN 1 Sambit masih dibawah rata – rata karena memang basic sekolah ini adalah SMP jadi kalau ditanya reaksi saya sangat bersemangat dengan adanya program tersebut, karena saya merupakan satu – satunya guru PAI disini saya sangat memperhatikan laju perkembangan PAI di sekolah ini. Apabila ada cara yang dapat diambil untuk mengembangkan PAI saya akan mencobanya, dan Alhamdulillah di dalam program PMP terdapat pertanyaan – pertanyaan yang isinya berguna untuk menilai kedisiplinan serta akhlak masing – masing siswa, bukan hanya siswa saja tetapi seluruh warga sekolah yang mengisi angket tersebut.⁷⁴ Contohnya seperti: Apakah murid pernah terlambat ke sekolah ?begitu juga sebaliknya untuk guru juga begitu. Nah dari itulah kita bisa menilai, mengukur seberapa tingkatan kedisiplinan, serta karakter agama di sekolah dan itu berhubungan sekali dengan pelajaran mereka yaitu pelajaran aqidah akhlak.Jadi pertanyaan – pertanyaan di dalam instrumen PMP itu sangat relevan dengan pelajaran mereka.Jadi ketika sudah disampaikan pelajarannya lalu menjawab instrument itu merupakan prakteknya.⁷⁵

⁷³Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/16-05/2017.

⁷⁴ Lihat transkrip dokumentasi nomor: 06/D/17-06/2017.

⁷⁵Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/15-05/2017.

Meskipun dengan pendapat yang beragam tetapi mereka yakin bahwa program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) tersebut membawa kontribusi yang besar bagi sekolah terutama bagi siswa untuk pembelajarannya.

Berikut ini wawancara kepada salah satu siswa SMPN 1 Sambit tentang program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) yaitu Rani Nurrenza:

Pengisian angket itu melatih kejujuran kami. Sebelumnya sudah ada sosialisasi untuk cara pengisian angket itu. Kami menjawab pertanyaan – pertanyaan yang sangat banyak terkait belajar kami.⁷⁶ Sebenarnya tidak sulit sih karena pertanyaannya hanya seputar bagaimana pembelajaran di sekolah kami, tetapi pertanyaannya sangat banyak, jadi memerlukan waktu yang lama dan itu menyita waktu kami untuk belajar UTS dan juga waktu untuk ke kantin.⁷⁷

SMPN 1 Sambit menerima dan menjalankan program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) ini dengan baik sesuai dengan prosedur yang diberitahukan oleh lembaga. Seperti hasil wawancara diatas, bahwa kontribusi program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) sangat besar yaitu untuk mengevaluasi program – program yang masih kurang agar sesuai dengan standar mutu pendidikan di Indonesia. Maka dari itu untuk meningkatkan mutu tersebut harus dilakukan manajemen ataupun cara untuk memperbaiki program sekolah.

Dari paparan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan diadakannya program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) memberikan respon atau reaksi yang berbeda – beda pada setiap individu ataupun

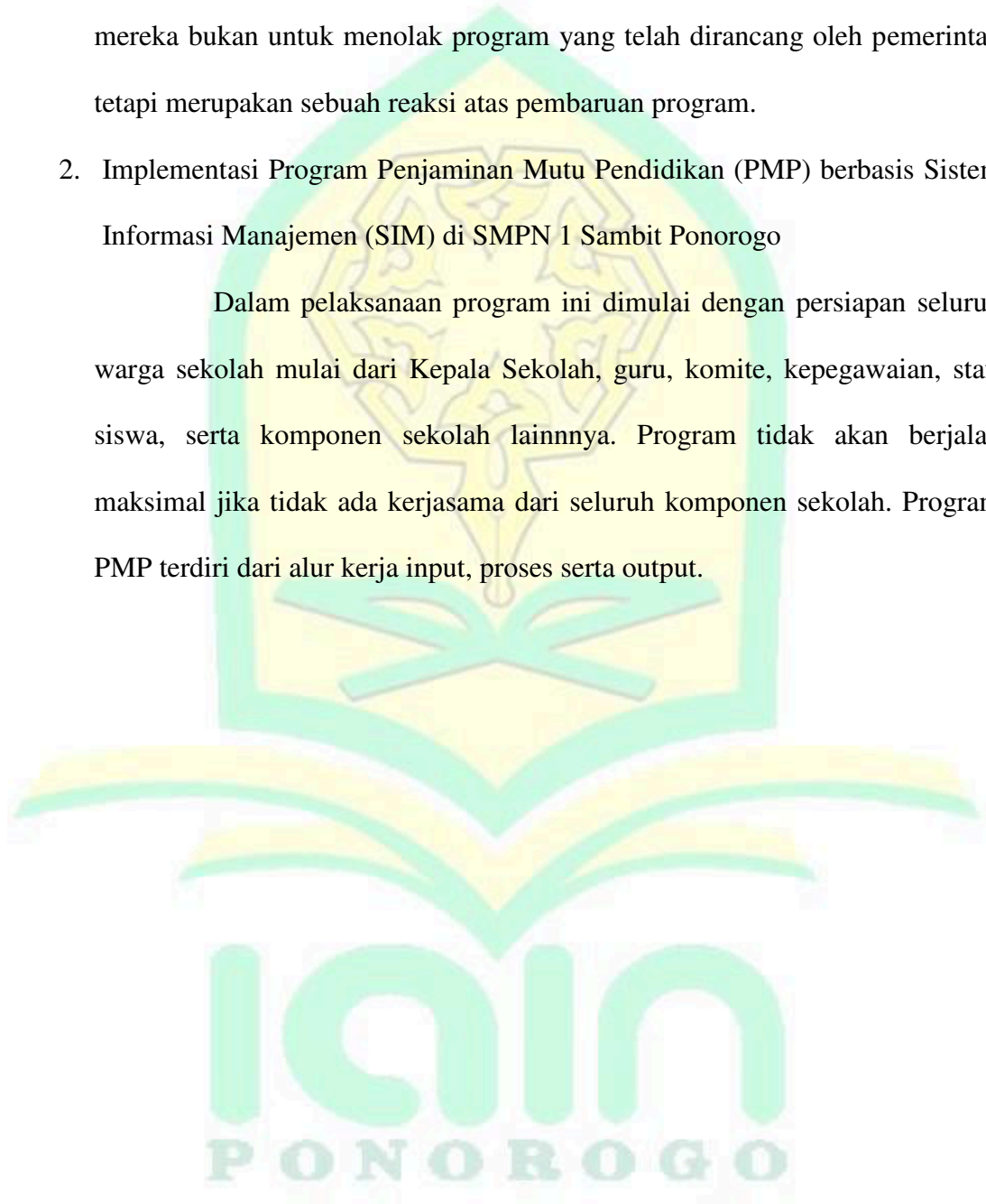
⁷⁶ Lihat transkrip dokumentasi nomor: 07/D/17-06/2017.

⁷⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 05/W/17-05/2017.

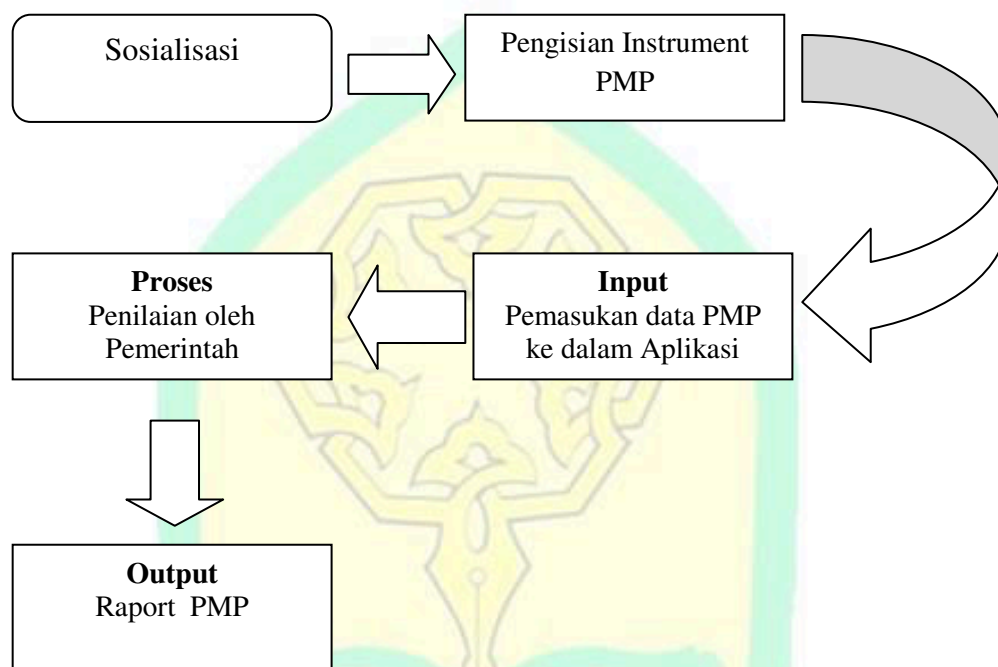
organisasi. Meskipun demikian tetapi setiap individu mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan mutu sekolah. Jadi perbedaan pendapat mereka bukan untuk menolak program yang telah dirancang oleh pemerintah tetapi merupakan sebuah reaksi atas pembaruan program.

2. Implementasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit Ponorogo

Dalam pelaksanaan program ini dimulai dengan persiapan seluruh warga sekolah mulai dari Kepala Sekolah, guru, komite, kepegawaian, staf, siswa, serta komponen sekolah lainnya. Program tidak akan berjalan maksimal jika tidak ada kerjasama dari seluruh komponen sekolah. Program PMP terdiri dari alur kerja input, proses serta output.



Alur kerja program dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :



Gambar 4.4 Alur Kerja Program PMP

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak

Darul Khoiri :

Semua warga ikut berpartisipasi untuk melaksanakan program PMP diantaranya guru, komite, siswa, kepala sekolah, semua juga diwajibkan untuk mengisi angket sesuai instruksi. Jadi setelah ada 6 bagian angket yang harus diisi bagian tata usaha kalau di sekolah kami, akan menginstall aplikasi PMP kemudian memasukkan datanya ke aplikasi tersebut untuk kemudian dikirim ke Pemerintah/ lembaga LPMP pada masing – masing Provinsi/ Daerah.⁷⁸

Setelah seluruh komponen siap dalam melaksanakan program maka harus ada sosialisasi terkait program yang akan dilaksanakan karena tanpa adanya

⁷⁸Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/10-06/2017.

sosialisasi ataupun pelatihan dikarenakan ini merupakan sistem baru dari Pemerintah maka dari sekolah mengadakan sosialisasi agar mudah dalam melaksanakannya.

Seperti yang dikatakan oleh Wa.Ka Kurikulum yaitu Ibu Enok:

Kalau sosialisasi sendiri dari perwakilan sekolah sudah mengikuti sosialisasi dari lembaga LPMP di masing – masing daerah, setelah itu sekolah mengadakan sosialisasi atau pelatihan di sekolah sendiri terkait pengisian angket PMP yang memang harus dipahami oleh seluruh warga sekolah, jika satu saja tidak paham kan juga menghambat karena angket yang diisi sangat banyak sekali jadi sangat penting sekali melihat program ini merupakan program baru yang membutuhkan banyak persiapan dan pelatihan. Itu saja masih banyak yang bingung terhadap program tersebut, jadi tetap kami adakan pengawasan atau pemantauan ketika pelaksanaan program tersebut agar tidak salah dalam mengisi data.⁷⁹

Sosialisasi program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak DarulKhoiri yang dibantu oleh semua pegawai sekolah baik dari Wa.Ka kurikulum sebagai penanggungjawab program, kemudian Bapak Agung yang menampilkan program di LCD. Setelah dilakukan sosialisasi ataupun pelatihan maka langkah dari sekolah adalah melakukan persiapan alat – alat yang digunakan untuk program PMP.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Enok selaku kurikulum sekolah beliau mengatakan :

Dengan mengerahkan seluruh warga sekolah mulai dari kepala sekolah, komite, staf, tata usaha, siswa dan warga sekolah lainnya.

⁷⁹Lihat transkrip wawancara nomor:02/W/13-05/2017.

persiapannya ya banyak mulai dari pelatihan program atau sosialisasi program itu merupakan persiapan sebelum pelaksanaan program tersebut selain itu juga menyiapkan alat – alatnya seperti internet yang paling penting lalu komputer serta angket PMP yang akan diisi oleh 6 kategori yaitu kepala sekolah, guru, komite, siswa, PTK, serta warga masyarakat atau boleh juga diisi oleh perwakilan wali siswa.⁸⁰ Setelah alat – alat sudah siap maka akan lebih mudah jika dipandu oleh yang menguasai program, kalau disini kami serahkan kepada pak Agung yang sudah paham bahkan mahir dalam urusan IT. Untuk persiapannya, saya memberi tugas pada masing – masing dengan tugas yang berbeda – beda agar cepat tertangani seperti contohnya Pak Agung yang bertugas programmer untuk masalah komputer, Bu Ruchotin untuk masalah pemasukan angket, Bu Tutik untuk masalah pengisian angket, serta Pak Darul sendiri mempunyai andil untuk memimpin sosialisasi pengisian PMP untuk persiapan lainnya pastikan komputer tersambung internet, angket printout yang telah digandakan sesuai dengan jumlah pengisi. Setelah angket siap, kemudian dibagikan untuk masing – masing pengisi yaitu, Kepala Sekolah, Komite, Guru, Siswa, serta perwakilan wali siswa. Setelah diisi lengkap kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut.⁸¹

Hal yang sama dikatakan juga oleh Ibu Ruchotin :

Persiapannya terkait alat – alatnya yaitu komputer kalau disekolah kami ada 10 unit yang kemudian disambungkan ke jaringan internet, untuk jaringan bisa memilih sendiri, bisa menggunakan Wifi ataupun kabel. Setelah tersambung internet, lalu melakukan penginstalan program PMP di link Dapodik.⁸² Data sekolah yang sudah terdaftar di Dapodik akan muncul secara otomatis di dalam aplikasi. Setelah program siap tinggal menunggu pengisian angket selesai untuk kemudian dimasukkan kedalam aplikasi.⁸³

Setelah semua persiapan selesai baru dilaksanakan pengisian angket printout PMP yang akan diisi oleh 6 tipe yaitu, instrument untuk Kepala Sekolah, Guru, PTK, Komite, Siswa, dan juga perwakilan wali siswa.

⁸⁰ Lihat transkrip dokumentasi nomor: 06/D/17-06/2017.

⁸¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/13-05/2017.

⁸² Lihat transkrip observasi nomor: 02/O/13-05/2017.

⁸³ Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/16-05/2017.

Seperti hasil wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak

DarulKhoiri:

Angket yang telah di printout akan diisi sesuai dengan kondisi sekolah, pertanyaannya sesuai dengan pertanyaan – pertanyaan seputar mutu sekolah,⁸⁴ seperti yang ada di angket bisa dilihat sendiri pertanyaannya mengacu pada 8 standar mutu pendidikan yang harus dicapai oleh sekolah karena pertanyaannya banyak sekali jadi, memerlukan ketelitian yang sangat ketika mengisinya.⁸⁵

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa angket pengisian PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) tersebut sangat banyak dan memerlukan ketelitian dalam mengisinya. Hal serupa juga dikatakan oleh perwakilan guru di SMPN 1 Sambit yang juga mengisi instrument PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) tersebut.

Hal ini dikatakan oleh guru PAI di SMPN 1 Sambit yaitu Bapak Nur

Hadi:

Untuk pengisian angket PMP itu saya rasa memang melatih guru terutama angket untuk guru melatih guru untuk menjadi guru yang professional sesuai dengan 8 standar mutu pendidikan di Indonesia. Kalau masalah pertanyaannya saya yakin sudah disesuaikan dengan kriteria mutu yang baik di Indonesia. Jadi langsung bisa dijadikan tolak ukur mutu sekolah. Jadi saya harapkan partisipasi guru di sekolah harus sama agar tercapai tujuan mutu yang diharapkan selama ini.⁸⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu siswa di SMPN 1 Sambit yaitu

Ratna:

Bu tutik memberikan kertas yang berisi pertanyaan – pertanyaan mengenai sekolah kami, yaitu tentang belajar, pembelajaran, sarana

⁸⁴ Lihat transkrip dokumentasi nomor: 06/D/17-06/2017.

⁸⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/10-06/2017.

⁸⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/15-05/2017.

dan prasarana yang harus diisi semuanya tanpa terkecuali. Ketika sosialisasi kemarin kami diharuskan menjawab dengan jujur jadi kami menjawab apa adanya saja. Karena pertanyaannya banyak sekali, jadi waktunya lama. Pengisian kemarin dipantau oleh guru kelas yang mengajar pada saat itu, kemudian kalau sudah selesai dikumpulkan ke guru kelas lalu guru kelas memberikan kepada Bu Tutik.⁸⁷

Ketika semua prosedur sudah terpenuhi mulai dari persiapan awal, persiapan tenaga sekolah, lalu dilanjutkan dengan pengisian data.⁸⁸ Setelah berjalan sesuai dengan prosedur maka data yang sudah lengkap akan dikirim dan akan diketahui hasilnya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Darul Khoiri yaitu:

Setelah kita lihat hasilnya dari report PMP kemarin dapat dilihat kekurangan yang masih ada di sekolah ini yang kami rasa masih sangat kurang yaitu terkait standar isi yang berisi tentang kurikulum sekolah yang masih belum berkembang sesuai dengan prosedur.⁸⁹ Kemudian tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan yang memang di sekolah kami mempunyai tenaga – tenaga yang tua. Seperti yang saya bilang di awal tadi, sekolah kami mempunyai tenaga – tenaga kerja yang tua karena dulu ketika sekolah jadi langsung diisi oleh tenaga – tenaga PNS dan tidak goyah sama sekali sampai sekarang. Jadi tidak memerlukan tenaga – tenaga baru lagi.⁹⁰

⁸⁷Lihat transkrip wawancara nomor:06/W/17-05/2017.

⁸⁸Lihat transkrip observasi nomor: 02/O/13-05/2017.

⁸⁹Lihat transkrip dokumentasi nomor: 07/D/17-06/2017.

⁹⁰Lihat transkrip wawancara nomor:01/W/10-06/2017.

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.48	★★★
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai ketentuan	1.87	★
5.3.2.	Tersedia Tenaga Laboran	0	★
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0	★
5.3.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0	★

Gambar 4.1 Raport PMP 2016 SMPN 1 Sambit (Standar

Pendidik dan Tenaga Kependidikan)⁹¹

Masalah pustakawan dan teknis laboran yang memang belum ada di sekolah kami. Kami berharap seiring berjalannya waktu dapat mengisi kekosongan tenaga – tenaga tersebut.⁹²

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	5.07	★★★★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	1.2	★
6.2.1.	Kondisi ruang kelas sesuai standar	1.4	★
6.2.2.	Memiliki ruang perpustakaan layak pakai	0	★

Gambar 4.2 Raport PMP 2016 SMPN 1 Sambit (Standar

Sarana dan Prasarana Pendidikan)⁹³

Selanjutnya masalah standar sarana dan prasarana pendidikan yang memang belum memadai seperti sarana dan prasarana pembelajaran yang memang masih kurang kami akui memang itu yang menjadi kendala di sekolah kami.⁹⁴ Dari sekolah belum bisa memberikan sarana pembelajaran yang lengkap seperti komputer, LCD, projector, dsb. Meskipun demikian sekolah kami dalam proses perbaikan sarana prasarana seperti sekarang untuk pelajaran PAI sudah ada IT nya semoga pelajaran – pelajaran lain bisa menyusul. Kondisi ruang kelas

⁹¹ Lihat transkrip dokumentasi nomor: 07/D/17-06/2017.

⁹² Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/10-06/2017.

⁹³ Lihat transkrip dokumentasi nomor: 07/D/17-06/2017.

⁹⁴ Lihat transkrip observasi nomor: 01/O/13-05/2017.

yang belum sesuai standar hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah siswa di sekolah kami, jadi dulunya kami kira gedungnya cukup untuk beberapa kelas ternyata semakin tahun jumlahnya meningkat tanpa kami duga.⁹⁵ Hal ini menjadikan kelas yang belum mendapatkan ruang mendapatkan kelas yang kurang memadai. Selanjutnya perpustakaan untuk perpustakaan juga samakasusnya karena kami kira dulu sekolah kami hanya menampung beberapa kelas saja, dan ternyata bertambah seiring waktu. Perpustakaan kami yang kecil membuat sarana belum layak untuk digunakan siswa yang jumlahnya bertambah banyak. Saya harapkan dengan adanya program ini dari pemerintah akan memberikan bantuan kepada sekolah terkait sarana dan prasarana yang masih kurang.⁹⁶

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
8	Standar Pembiayaan	4.92	***
8.1.2.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	0	*
8.1.3.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	0	*

Gambar 4.3 Raport PMP 2016 SMPN 1 Sambit (Standar Pembiayaan)⁹⁷

Karena sekolah kami SMP Negeri jadi kami masih belum bisa membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu hanya mungkin ada jangka pembayaran bagi yang belum bisa membayar tepat waktu. Mungkin ada bantuan dari pemerintah untuk siswa yang berprestasi yaitu kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar). Dan dari sekolah juga memang belum mendata terkait latar belakang ekonomi siswa. Sebenarnya memang sangat penting untuk mengetahui kemampuan masing – masing siswa tetapi memang dari sekolah belum melakukannya. Seiring berjalannya waktu kami akan berusaha agar bisa meringankan beban wali siswa.⁹⁸

Setelah program selesai maka akan diketahui hasil mutu sekolah melalui penilaian PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan). Hasil tersebut dapat dilihat

⁹⁵ Lihat transkrip observasi nomor: 01/O/13-05/2017.

⁹⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/10-06/2017.

⁹⁷ Lihat transkrip dokumentasi nomor: 07/D/17-06/2017.

⁹⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/10-06/2017.

pada raport PMP 2016 yang telah diberikan oleh Pemerintah.⁹⁹ Di dalam raport tersebut akan tampak apa saja program sekolah yang memerlukan perbaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala sekolah diatas. Evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan 8 standar mutu yang harus dicapai sekolah agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Darul Khoiri :

Program PMP itu sebenarnya juga harus dievaluasi, jadi setelah ada program tersebut sekolah mengecek atau istilahnya ya mendata lagi mana program yang harus di perbaiki atau sarana prasarana apa yang masih kurang agar nyaman untuk semua warga sekolah. Jadi setelah adanya evaluasi itu dari sekolah sudah mengetahui ternyata sarana dan prasarana di sekolah ini masih kurang terutama masalah perpustakaan yang masih belum layak pakai dan juga sarana pembelajaran yang masih kurang lengkap lagi hal ini juga sudah dibuktikan dengan adanya raport PMP 2016 SPMN 1 Sambit yang sudah keluar kemarin ini membuat kita semakin bersemangat untuk memperbaiki kembali program – program sekolah yang masih kurang.¹⁰⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wa.Ka Kurikulum yaitu Ibu Enok :

Dalam raport PMP juga sudah terlihat apa saja program yang harus diperbaiki. Kalau evaluasi sekolah diantaranya tentang kurikulum sekolah setelah diadakan program tersebut kurikulum sekolah mengalami perbaikan lagi baik dari segi internal maupun eksternal, dari segi internal yaitu dari tenaga pendidik yaitu guru mapel untuk lebih meningkatkan kualitas guru di sekolah. Selanjutnya sarana prasarana sekolah juga mengalami perbaikan diantaranya dengan mengfungsikan kembali sarana prasarana yang masih bisa dipakai seperti bangku sekolah yang rusak sebagian di urai kembali kemudian digunakan untuk tambahan bangku di ruang kelas.¹⁰¹

⁹⁹Lihat transkrip dokumentasi nomor: 07/W/17-06/2017.

¹⁰⁰Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/10-06/2017.

¹⁰¹Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/13-05/2017.

Hal serupa juga diungkapkan oleh tata usaha sekolah yang bernama Ibu

Ruchotin:

Dalam mengimplementasikan program perbaikan mutu kita awali dengan mengevaluasi seluruh program sekolah yang sekiranya penting atau sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Diantaranya kurikulum sekolah, sarana prasarana sekolah, dan juga dengan peningkatan prestasi siswa dengan mengikuti berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan prestasi sekolah. Kalau dulu mengevaluasi mutu sekolah menggunakan EDS saja tapi untuk tahun ini dari pemerintah memberikan program baru yaitu PMP untuk lebih meningkatkan mutu sekolah menjadi lebih baik. Program ini sangat baik digunakan dalam sekolah terutama sekolah yang masih kurang dalam hal mutu sekolah. Karena yang diisi berupa angket pertanyaan individu jadi lebih mudah dalam merekap datanya apalagi tingkat kevalidan sudah sangat jelas.¹⁰²

Dalam peningkatan mutu pendidikan sangatlah diperhatikan mengingat sekolah yang basicnya SMP mempunyai pengetahuan tentang agama yang sangat minim sekali. Maka dari itu sekolah membutuhkan pengembangan kurikulum tentang agama islam agar mempunyai lulusan yang tidak hanya ahli dalam bidang umum tetapi juga bidang keagamaan terutama agama islam.

Dalam hal ini juga di ungkapkan oleh guru PAI di sekolah yaitu Bapak

Nur Hadi:

Mutu pendidikan agama islam di SMPN 1 sambit ini secara umum sedang – sedang saja, artinya karena latar belakang siswa kita dari SMPN sehingga kemampuan agama islam di SMPN 1 sambit ini juga bermacam – macam sehingga kalau kita simpulkan berdasarkan nilai ya sekitar di atas KKM lebih sedikit, belum sampai maksimal. Kalau dilihat tentang pemahaman tentang Al Quran, anak – anak yang sudah ada pendidikan semacam TPA/TPQ atau pendidikan yang sejenis tentang cara membaca Al – Qur'an ya sudah lumayan bagus, sehingga

¹⁰²Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/16-05/2017.

kalau kita prosentase anak – anak yang sudah bisa membaca dan menulis Al – Qur'an sekitar 60 % jadi yang 40 % masih perlu bimbingan lagi.¹⁰³ Meskipun demikian dari guru maupun sekolah harus mempunyai cara atau manajemen yang berguna untuk mengembangkan pembelajaran PAI di SMPN ini diantaranya dengangurunya aktif, kemampuan itu mungkin relatif, masing – masing personal itu punya kemampuan yang berbeda, tetapi kalau gurunya aktif itu saja sudah ada penilaian, yang kedua guru agama seharusnya datang terlebih dahulu dan pulang paling akhir, gurunya juga harus aktif dalam mengikuti MGMP, karena disana banyak sekali perkembangan ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan PAI terbukti jika satu saja tidak mengikuti MGMP pasti ketinggalan seperti tentang IT, karena bagaimanapun figur seorang guru agama itu juga diteladani oleh anak – anak bagaimana kita melatih anak – anak sedangkan kita saja tidak, terkait kemampuan saya pikir siapapun jika mau belajar pasti bisa. MGMP dilakukan 1 minggu satu kali, terbukti di SMPN 1 Sambit pembelajaran PAI sudah dilengkapi dengan IT , yaitu LCD lengkap itu semua dalam rangka meningkatkan mutu PAI jadi cukup datang ke musholla saja sudah cukup.¹⁰⁴

Adanya evaluasi program PMP(Penjaminan Mutu Pendidikan) di SMPN 1 Sambit juga memberikan kontribusi yang baik pada siswa – siswa di SMPN 1 Sambitpasalnya, siswa yang telah mengisi angket terkait program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) akan mengetahui sejauh mana mereka melaksanakan pembelajaran di SMPN 1Sambit, apakah sudah sesuai dengan kurikulum sekolah atau masih jauh.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu siswa yang bernama Rani Nurrenza, siswi kelas VII D :

Setelah dilaksanakannya program PMP dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan juga memperbaiki sarana dan prasarana yang masih kurang diadakan evaluasi terkait program tersebut. Tujuannya untuk membenahi anak –

¹⁰³ Lihat transkrip observasi nomor: 06/O/06-12/2017.

¹⁰⁴Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/15-05/2017.

anak yang masih kurang dalam mengikuti pembelajaran terutama PAI mereka akan mengetahui apakah tindakan mereka selama ini sudah benar atau masih salah. Sangat berguna juga untuk meningkatkan lagi dalam menjaga sarana dan prasarana sekolah tidak seperti dulu lagi.¹⁰⁵

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu siswa yang bernama Ratna, siswi kelas VII D :

Dengan adanya program peningkatan mutu sekolah, sekolah mempunyai program – program yang sangat berguna dalam memperbaiki mutu sekolah diantaranya seperti program Adiwiyata yaitu program penghijauan sekolah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekolah dan juga seperti greenhouse yaitu rumah yang berisi tanaman – tanaman hijau yang juga bertujuan untuk menghijaukan kembali sekolah serta melatih siswa akan pentingnya peduli dengan lingkungan.¹⁰⁶ Program yang lain yaitu sekolah menanam tanaman obat keluarga agar anak – anak mengetahui tanaman apa saja yang bisa digunakan sebagai obat.¹⁰⁷

Setelah diadakannya wawancara tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi sebuah program baru memerlukan kesiapan yang matang baik dari segi persiapan awal, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Persiapan yang dilakukan SMPN 1 Sambit sangatlah banyak mulai dari sosialisasi kepada seluruh komponen yang ikut dalam pelaksanaan program mulai dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, PTK, siswa, hingga perwakilan dari wali murid. Sehingga setelah diadakan sosialisasi program PMP dapat terlaksana dengan mudah karena setiap komponen sudah diberikan bimbingan dan arahan terkait pengisiannya. Setelah program dilaksanakan baik dari awal yaitu pengisian dan pemasukan data kedalam aplikasi maka

¹⁰⁵Lihat Transkrip wawancara nomor: 05/W/17-05/2017.

¹⁰⁶Lihat transkrip observasi nomor: 03/O/13-05/2017.

¹⁰⁷Lihat Transkrip wawancara nomor: 06/W/17-05/2017.

dari sekolah mengadakan evaluasi hingga terkait program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) meskipun program baru yang notabene sulit dilaksanakan bagi sekolah yang belum menggunakan SIM tetapi SMPN 1 Sambit mampu melaksanakan program tersebut tanpa mengganggu kegiatan sekolah lainnya.

3. Kontribusi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit Ponorogo

Dalam menerapkan program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) berbasis SIM mempunyai sumbangan yang berarti di sekolah terutama di SMPN 1 Sambit. Program tersebut menjadi evaluasi sekolah terkait bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diharapkan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Darul Khoiri :

Dengan SPMP itu sangat berguna sebagai alat kontrol/ evaluasi sekolah, sehingga sekolah akan tahu kekurangannya dimana agar sekolah mampu mengambil langkah perbaikan, ini merupakan yang paling pokok. Terkait dengan peningkatan mutu tanpa adanya instrumen yang diberi pemerintah kita tidak akan tahu sekolah apakah sudah maju apa belum kalau sudah maju yang keberapa urutannya hal ini tidak akan diketahui kalau tidak diukur dengan program ini.¹⁰⁸

Sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Ibu Enok selaku Wa.KaKurikulum sekolah, beliau mengatakan :

Program yang diberikan pemerintah sangat membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini, antara lain ; (1)

¹⁰⁸Lihat Transkrip wawancara nomor: 01/W/10-06/2017.

Kurikulum sekolah, setelah adanya program PMP dan evaluasinya kurikulum yang ada di sekolah mengalami perkembangan baik dari pendidik dan peserta didik, pembelajaran, serta sarana dan prasarana sekolah. Dari segi pendidik, pendidik diharapkan lebih meningkatkan kembali kaitannya dengan skill, keprofesionalan dalam mengajar. Hal ini dapat ditingkatkan melalui MGMP sekolah dengan mengikuti kegiatan MGMP ini guru diharapkan bisa mengikuti terus terkait evaluasi – evaluasi pelajaran yang diampu oleh guru van. Setelah mengikuti MGMP, guru melaksanakan hasil MGMP di sekolah.¹⁰⁹

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nur Hadi, selaku guru PAI di SMPN 1

Sambit:

Seorang guru harus menjadi guru yang aktif. Meskipun mempunyai kemampuan yang sedang, jika gurunya aktif baik mengikuti penataran maupun kegiatan guru lainnya maka kemampuan itu akan meningkat yaitu kemampuan professional seorang guru. Setelah mengikuti MGMP untuk guru mata pelajaran yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dari guru van mengevaluasi apa saja program dari sekolah yang dirasa masih kurang. Setelah dilakukan evaluasi, langkah selanjutnya menambah program sekolah misalnya saja pelajaran PAI di SMPN 1 Sambit ini sudah menggunakan teknologi masa kini, seperti LCD, Projector, dan IT dan pembelajarannya dilaksanakan di musholla sekolah agar lebih menghayati pendidikan agama islam.¹¹⁰

Dari program ekstrakurikuler yaitu dengan menambah ekstrakurikuler sekolah seperti kepramukaan, PMR, tari, dan juga karawitan. Dengan mengikuti ekstrakurikuler siswa akan bersemangat dalam mengikuti pelajaran.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu siswi di SMPN 1 Sambit, yaitu Ratna : “Kegiatan ekstrakurikuler sekolah sangat membantu dalam memberi semangat anak – anak yang membandel di sekolah. Mereka

¹⁰⁹Lihat Transkrip wawancara nomor: 02/W/13-05/2017.

¹¹⁰Lihat Transkrip wawancara nomor: 03/W/15-05/2017.

mengikuti ekstra dengan semangat apalagi setelah dilanjutkan pelajaran mereka sudah terdorong semangat dari ekstra yang mereka ikuti”.¹¹¹

Selain ekstrakurikuler, ada juga pengembangan dalam sarana dan prasarana sekolah. Menjaga sarana dan prasarana sekolah merupakan cara untuk menjaga fasilitas sekolah agar terjaga juga dengan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang masih bisa digunakan kembali.

Seperti yang dikatakan oleh pegawai Tata Usaha sekolah yaitu, Ibu Ruchotin :

Setelah raport PMP kemarin keluar tampak bahwa sarana dan prasarana sekolah masih sangat kurang. Sekolah mencoba memperbaiki sarana dan prasarana yang masih bisa diperbaiki seperti bangku – bangku sekolah yang sudah rusak di kumpulkan kembali dan menyewa ahli kayu untuk memperbaiki bangku – bangku agar bisa digunakan lagi serta bisa menambah inventaris sekolah itu merupakan usaha sekolah dalam meningkatkan mutu sarana prasarana sekolah.¹¹²

Dari paparan data diatas dapat kita ketahui bahwa program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) mempunyai kontribusi bagi sekolah. Dengan program tersebut sekolah dapat mengetahui program – program apa saja yang memerlukan perbaikan agar tercipta sekolah yang mempunyai standar mutu yang tinggi sesuai dengan yang diharapkan di SMPN 1 Sambit. Menurut hasil raport PMP 2016, SMPN 1 Sambit sudah mempunyai standar mutu yang cukup bagus. Hal ini bisa dilihat dari perolehan nilai dari 8 standar. Masing – masing standar sudah mencapai nilai diatas 5 kurang dua angka lagi agar

¹¹¹Lihat Transkrip wawancara nomor: 06/W/17-05/2017.

¹¹²Lihat Transkrip wawancara nomor: 04/W/16-05/2017.

sekolah dapat mencapai standar mutu yang sempurna. Ada 3 standar yang memperoleh nilai dibawah 5 yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Hal ini menjadi PR bagi sekolah untuk terus meningkatkan mutu sekolah menjadi lebih baik lagi.



BAB V

ANALISIS DATA

A. Analisis Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit Ponorogo

1. Analisis Respon Sekolah Terhadap Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit Ponorogo

Respon yang terjadi ketika suatu kebijakan dilaksanakan akan menimbulkan dua dampak yaitu menerima serta menolak. Namun yang terjadi di SMPN 1 Sambit Ponorogo semua pihak menerima program tersebut namun ada yang menerima dengan senang hati dan ada juga yang menerima tetapi tidak secara langsung. Pihak yang menerima dengan senang hati sadar akan pentingnya suatu kebijakan yang diadakan pemerintah pada sekolah mereka. Kelompok penerima program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) di SMPN 1 Sambit merasa bahwa adanya suatu kebijakan pendidikan sangatlah berguna bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bagi pelaksana kebijakan yaitu semua komponen – komponen sekolah sudah sepantasnya untuk mencari sebuah jalan yang dapat ditempuh sekolah agar tidak kalah saing dengan sekolah – sekolah lainnya. Jika menginginkan output atau keluaran yang unggul harusnya menerima sebuah kebijakan pendidikan yang

diserahkan pemerintah untuk dikelola dan dilaksanakan kemudian hasilnya dievaluasi apakah sudah baik atau masih perlu perbaikan lagi.

Hal ini sesuai dengan teori responsivitas bahwa dukungan terhadap adanya program kebijakan memberikan jalan yang mudah bagi pemerintah untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Pada dasarnya sebuah kebijakan bukanlah sebuah momok yang harus ditakuti oleh para pelaksana kebijakan. Sebuah kebijakan akan membuahkan hasil yang maksimal bagi pemangku kebijakan maupun pelaksananya yang membentuk sebuah kelompok yaitu kelompok penerima kebijakan. Kelompok penerima adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut.¹¹³

Faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan – hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain respon positif dari sebuah kebijakan pendidikan terdapat pula respon yang menerima sebuah kebijakan tetapi disebabkan karena sebuah keterpaksaan. Hal ini dikarenakan sebuah kebijakan pemerintah yang harus

¹¹³ Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 206.

dilaksanakan oleh sekolah – sekolah tanpa persetujuan dari sekolah. Semua sekolah yang menerima sebuah kebijakan kebanyakan menerima serta mematuhi semua yang diinstruksikan oleh pemerintah. Meskipun tahap penerimaannya tidak secara langsung tetapi membutuhkan waktu untuk diterima di sekolah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan sebuah kebijakan baru pada sekolah memerlukan waktu untuk diterima langsung di sekolah. Dikarenakan banyaknya agenda yang dilaksanakan oleh sekolah maka adanya sebuah program baru akan menimbulkan ‘efek samping’ ketika diberikan oleh sekolah. Program PMP yang dilaksanakan di SMPN 1 Sambit memberikan kontribusi bagi SMPN 1 Sambit hal ini membuat sebuah kebijakan diterima oleh sekolah. Meskipun pada awalnya dari Bapak Darul Khoiri sendiri selaku kepala sekolah kaget karena program PMP yang diberikan ke sekolah dikarenakan padatnya kegiatan yang dilaksanakan di SMPN 1 Sambit tetapi dengan melihat hasil yang dicapai dengan adanya program PMP tersebut menjadikan respon yang berbalik yaitu mendukung adanya sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sama halnya ketika kita tidak mengetahui tentang manfaat sebuah sesuatu pasti kita akan menganggap remeh ataupun tidak peduli dengan sesuatu tersebut tetapi jika sudah mengetahui manfaat bahkan hasil yang dikeluarkan dari sesuatu tersebut pasti akan mengharapkan sesuatu tersebut selalu ada. Hal ini sama dengan program PMP (Penjaminan

Mutu Pendidikan) yang kelihatannya membuat permasalahan baru di dalam pendidikan tetapi ketika sudah dilaksanakan akan tampak kontribusinya terhadap kesejahteraan pendidikan. Seperti yang dirasakan sendiri oleh Bapak Darul Khoiri yang merasakan manfaat dari adanya program PMP di SMPN 1 Sambit yaitu untuk mengevaluasi program – program yang masih perlu diperbaiki lagi agar sesuai dengan standar mutu pendidikan di Indonesia.

Dari paparan data tentang respon sekolah terhadap sebuah kebijakan pendidikan sesuai dengan teori kebijakan pendidikan bahwa dukungan dari pihak – pihak yang menerima kebijakan akan mempermudah tujuan yang akan dicapai tanpa adanya hambatan – hambatan yang menghalangi proses implementasi program.

2. Analisis Implementasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit Ponorogo

Implementasi pembaruan kebijakan pendidikan di SMPN 1 Sambit didasarkan atas adanya surat edaran dari dinas pendidikan tentang Aplikasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yaitu suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Darul Khoiri “ surat edaran yang diberikan oleh Dapodik (Data Pokok Pendidikan), kami tetap melaksanakan program tersebut dengan patuh karena memang sudah

sebuah program yang harus dijalankan oleh semua sekolah”. Untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan.

Program penjaminan mutu pendidikan berupa aplikasi PMP di SMPN 1 Sambit dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Seperti yang dikatakan oleh bapak Darul Khoiri “Semua warga ikut berpartisipasi untuk melaksanakan program PMP diantaranya guru, komite, siswa, kepala sekolah, semua juga diwajibkan untuk mengisi angket sesuai instruksi”. Wujud dari suatu dukungan terhadap pelaksanaan program adalah dengan membantu dalam mengimplementasikan program.

Selanjutnya, dalam memahami suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi. Implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah – langkah yang strategik, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Tingkat keberhasilan proses ini akan dipengaruhi berbagai unsur, baik yang bersifat mendukung atau menghambat,

serta lingkungan, baik fisik, sosial maupun budaya. Hal yang perlu diwaspadai adalah dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah, sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan kebijakan.

Suatu kebijakan akan menemui banyak masalah pada tahap pengimplementasiannya, karena itu alternatif yang dipilih oleh pembuat kebijakan, harus dapat diimplementasikan. Masalah tersebut sering diartikan secara sederhana, padahal masalah oleh seseorang mungkin menguntungkan bagi orang lain. Sehubungan dengan sifat praktis dan terkandungnya tujuan dalam perumusan kebijakan, maka implementasi kebijakan berkenaan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi para pelaku. Namun, ketika kegagalan kebijakan terjadi, maka perlu dikaji apakah karena perumusan kebijakan tersebut memang buruk atau kesalahan dalam mengimplementasikannya.

Implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam menentukan proses perumusan kebijakan selanjutnya. Sebab, berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya.¹¹⁴

Para pegawai sekolah, guru, komite, staf, serta siswa di SMPN 1 Sambit masih terkendala terkait pemahaman tentang pengisian aplikasi PMP

¹¹⁴ Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 41-42.

maka perlu diadakan sosialisasi yang bertujuan untuk memudahkan para pengisi kuesioner dalam aplikasi PMP. Sosialisasi program PMP diikuti oleh seluruh sekolah yang namanya terdaftar pada data pokok pendidikan (Dapodik) termasuk didalamnya SMPN 1 Sambit yang berlokasi di Ponorogo. Setelah dari perwakilan sekolah mengikuti sosialisasi di daerah maka setiap perwakilan masing – masing sekolah mengadakan sosialisasi di sekolah masing – masing.

Sosialisasi terkait program baru seperti program PMP sangatlah penting supaya tidak menjadi penghambat suatu sistem. Hal ini sesuai dengan teori bahwa kebanyakan para pembaru beranggapan bahwa pesan – pesan pembaruan yang disampaikan kepada para anggotanya telah mengalami proses pemikiran dan dipersiapkan dengan matang, dirumuskan dengan sejelas – jelasnya, tetapi setelah disampaikan kepada para anggotanya, jangankan dituruti dimengertipun tidak, bahkan melakukan perlawanan. Kebanyakan para pembuat kebijakan sering beranggapan bahwa pihak – pihak yang terkena kebijakan, seperti para pegawai atau tenaga kependidikan yang terkena kebijakan, seperti para pegawai atau tenaga kependidikan yang terkena kebijakan akan mudah memahami arti pentingnya kebijakan itu dilakukan, dan tidak akan menimbulkan penolakan – penolakan.¹¹⁵

¹¹⁵ Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 21-26.

Semua penilaian dalam instrument berpacu pada standar mutu pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan teori bahwa apa yang menjadi esensi akreditasi adalah sebagai bentuk Akuntabilitas Publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan dengan menggunakan instrument dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan mencakup:

- 9) Standar Isi
- 10) Standar Proses
- 11) Standar Kompetensi Lulusan
- 12) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 13) Standar Pengelolaan
- 14) Standar Sarana dan Prasarana
- 15) Standar Pembiayaan Pendidikan
- 16) Standar Penilaian

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program PMP di SMPN 1 Sambit adalah para pegawai yang ikut andil dalam pelaksanaan program tanpa adanya campur tangan para pegawai sekolah tidak mungkin program dapat dilaksanakan dengan mudah. Sesuai dengan teori bahwasannya tingkat keberhasilan proses ini akan dipengaruhi berbagai unsur, baik yang bersifat

mendukung atau menghambat, serta lingkungan, baik fisik, sosial maupun budaya.¹¹⁶

Pelaksanaan program PMP di SMPN 1 Sambit mempunyai tiga alur kerja pokok yaitu input, proses, serta output. Input yaitu dengan memasukkan data instrument kedalam aplikasi PMP secara terprogram oleh pegawai sekolah dan dibantu oleh tata usaha sekolah. Kemudian proses yaitu proses penilaian apakah mutu sekolah sudah sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional. Sedangkan output akan tampak setelah dikeluarkannya raport PMP 2016 yang didalamnya terdapat 8 standar mutu sekolah serta penilaiannya pada setiap aspeknya. Alur kerja dalam suatu program terdapat tiga komponen pokok yang harus ada yaitu input, proses, serta output. Hal ini sesuai dengan alur kerja program PMP yang juga terdapat komponen input, proses, serta output.

Hal ini sesuai dengan teori bahwa sistem informasi mengandung tiga aktivitas dasar di dalamnya, yaitu: aktivitas masukan (input), pemrosesan (processing), dan keluaran (output). Tiga aktivitas dasar ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk pengambilan keputusan, pengendalian operasi, analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. Langkah berikutnya dalam implementasi program adalah

¹¹⁶ Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 41-42.

mengembangkan prosedur – prosedur yang akan menentukan data mana yang akan diperlukan, kapan dan dimana data itu dapat diperoleh, untuk apa data itu dipergunakan, serta memberikan instruksi yang harus diikuti oleh pengolahnya, dan langkah terakhir adalah menyiapkan output laporannya.¹¹⁷

Dalam program PMP output laporan dari hasil pelaksanaan program adalah raport PMP. Hasil tersebut akan digunakan sekolah dalam mengevaluasi program – program sekolah yang masih perlu diperbaiki.

Dari analisis data tersebut terdapat kesesuaian antara teori dan respon bahwa teknologi informasi atau SIM (Sistem Informasi Manajemen) sangat membantu dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan yaitu penjaminan mutu pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Alur kegiatan pokok dalam sistem informasi manajemen (SIM) yaitu input, proses dan output juga dilaksanakan dalam program penjaminan mutu pendidikan (PMP). Kegiatan tambahan dalam program PMP adalah sosialisasi sebelum program dilaksanakan supaya dalam pengimplementasian program dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan terutama masalah pemahaman. Kegiatan tambahan lain dalam implementasi program secara pokok yaitu evaluasi program. Jadi setelah diadakan pelaksanaan program, dari sekolah mengadakan evaluasi

¹¹⁷ Lantip Diat Prasojo, *Teknologi Informasi Pendidikan* (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 174-176.

terkait implementasi program PMP supaya dapat diperbaiki dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program PMP yang akan datang.

3. Analisis Kontribusi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit Ponorogo

Kebijakan pendidikan dilakukan di setiap daerah termasuk di SMPN 1 Sambit Ponorogo kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait penjaminan mutu pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berfokus pada kualitas mutu sekolah mencakup 8 standar mutu nasional pendidikan. Kebijakan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan teknologi informasi pada aplikasi PMP yang diberikan oleh setiap sekolah dasar dan menengah di seluruh daerah di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan teori bahwa proses pendidikan yang bermutu akan membuahkan hasil pendidikan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan efisien perlu disusun dan dilaksanakan program – program pendidikan yang mampu membelajarkan peserta didik secara berkelanjutan, karena dengan kualitas pendidikan yang optimal, diharapkan akan dicapai keunggulan sumber daya manusia yang dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

Oleh karena itu demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas, diperlukan manajemen pendidikan yang dapat menggerakkan segala sumber daya pendidikan. Manajemen pendidikan itu terkait dengan manajemen peserta didik yang isinya merupakan pengelolaan dan juga pelaksanaannya. Manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Manajemen pendidikan untuk saat ini merupakan hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan output yang berkualitas tinggi.¹¹⁸

Tujuan pemerintah dalam setiap pembaruan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu sekolah supaya menjadi sekolah yang unggul dan sesuai dengan standar mutu pendidikan di Indonesia. Mengingat Negara Indonesia sekarang ini sangat membutuhkan generasi muda yang terampil serta mempunyai skill untuk kemajuan Negara Indonesia. Dengan meningkatkan kualitas sekolah serta para siswa yang bernaung didalamnya maka cita – cita Negara akan terwujud.

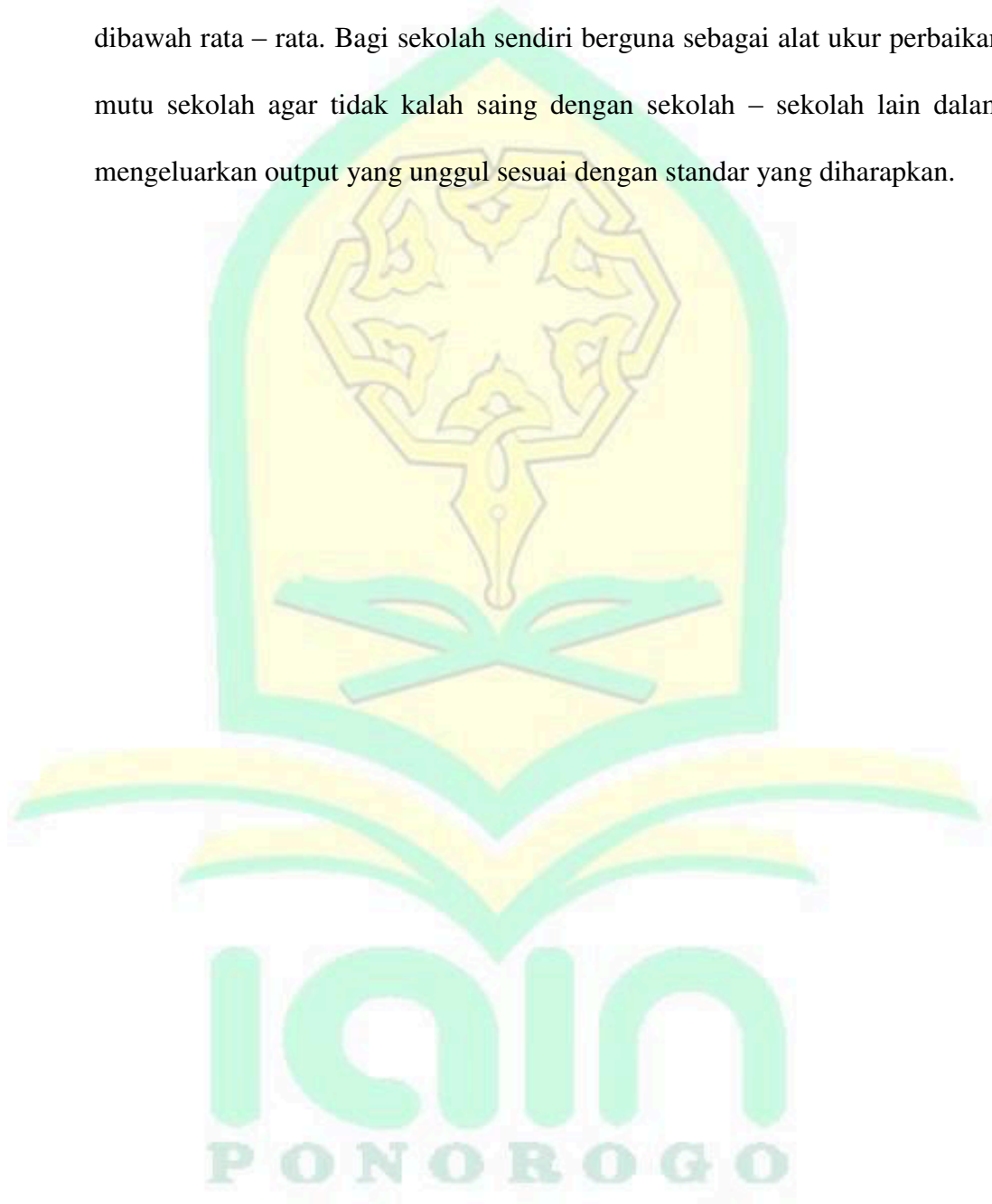
¹¹⁸ Deni Darmawan, Sistem Informasi Manajemen (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 40-41.

Program PMP yang dilaksanakan di SMPN 1 Sambit memberikan banyak kontribusi pada sekolah diantaranya dengan adanya program PMP tersebut sekolah dapat melakukan evaluasi program – program sekolah yang masih perlu diperbaiki lagi. Selain alat kontrol atau evaluasi sekolah program PMP ini juga sangat membantu sekolah dalam mengukur sejauh mana keefektifan program – program sekolah seperti program kurikulum, pendidik dan peserta didik, pembelajaran, serta sarana dan prasarana sekolah. Tanpa adanya evaluasi program sekolah maka sekolah tidak akan tahu seberapa maksimal program yang sudah dijalankan selama ini.

Hal ini sesuai dengan teori bahwa peranan teknologi informasi sangat penting dalam pengembangan dunia pendidikan. Peran tersebut dapat dilihat dari banyaknya manfaat yang dapat diambil dari implementasi teknologi informasi untuk mendukung pengembangan pendidikan. Jadi peranan teknologi dalam memajukan dunia pendidikan tidak diragukan lagi. seperti implementasi sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, pemanfaatan LAN, Internet, dan lain – lain.

Dari uraian di atas terdapat kesesuaian antara teori dan analisis bahwa untuk program PMP yang dilaksanakan di seluruh sekolah dasar dan menengah di Indonesia mempunyai banyak kontribusi yang bisa diambil oleh sekolah serta bagi dinas pendidikan. Bagi pemerintah terutama dinas pendidikan program PMP berguna untuk mengukur mutu sekolah apakah sudah sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional atau belum agar

mempermudah pemerintah yaitu dinas pendidikan sendiri dalam memberikan bantuan pendidikan kepada sekolah – sekolah yang mempunyai standar mutu dibawah rata – rata. Bagi sekolah sendiri berguna sebagai alat ukur perbaikan mutu sekolah agar tidak kalah saing dengan sekolah – sekolah lain dalam mengeluarkan output yang unggul sesuai dengan standar yang diharapkan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Respon terhadap program PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit ada yang menerima dengan senang hati atas program PMP, ada juga yang menerima dengan terpaksa atas program PMP tersebut.
2. Implementasi sebuah program baru memerlukan kesiapan yang matang baik dari segi persiapan awal, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Persiapan yang dilakukan SMPN 1 Sambit meliputi sosialisasi, pengisian dan pemasukan data, kemudian evaluasi program. Meskipun ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program PMP berbasis SIM, tetapi secara umum program PMP dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Kontribusi program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) di SMPN 1 Sambit yaitu sebagai acuan sekolah agar mengetahui kekurangan – kekurangan dari program sekolah secara cepat, jelas, dan valid supaya sekolah dapat mengevaluasi serta memperbaiki mutu sekolah sesuai dengan standar mutu pendidikan Nasional.

B. Saran

1. Kepala sekolah sebaiknya terus memperhatikan, mendukung adanya perkembangan yang terjadi dalam pembaruan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Baik perkembangan program – program sekolah sendiri maupun program – program yang diberikan oleh pemerintah terutama oleh dinas pendidikan. Supaya sekolah dapat terus menghasilkan output yang unggul sesuai dengan harapan bangsa Indonesia.
2. Guru – guru serta para staf sekolah yang ikut dalam pembaruan program sekolah sebaiknya juga menerapkan program yang perlu diperbaiki oleh sekolah. Tanpa adanya dukungan dari pihak – pihak yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program maka akan sulit dalam mengembangkan program. Maka dukungan serta bantuan dari para guru dan staf sekolah sangatlah membantu sekolah.
3. Untuk para siswa dan siswi SMPN 1 Sambit semoga dapat menjadi output yang unggul seperti yang diharapkan oleh sekolah. Dengan ikut melaksanakan pembaruan – pembaruan yang dilakukan oleh sekolah maka akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan para siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Nur. *“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Ma’arifCekokBabadanPonorogo”*, Skripsi STAIN, Ponorogo, 2011.
- Ali Riyadi, Ahmad. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2008.
- Anwar, Idhoci. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2013.
- Arcaro, Jarome S. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif*, Malang: Kalimasada, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta, 2006.
- Bahtiar Irianto, Yoyon. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Darmawan, Deni. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Diat Prasajo, Lantip. *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Fatah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Fatah, Nanang. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Fatah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hadi Sutopo, Ariesto. *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

- Iriantara, Yosol. Pendidikan Berbasis Mutu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulyasa, Enco. Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyuksesan MBS dan KBK. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Rochaety, Eti. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suharsaputra, Uhar. Administrasi Pendidikan. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Syaifuddin. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Tilaar, H.A.R. Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Tt: PT. Imperial Bakti Utama, 2007.

